



Indonesian Basic Income  
Guarantee (IndoBIG) -  
Network

---

Working Paper Series

**JAMINAN  
PENGHASILAN  
DASAR UNTUK  
SEMUA**

Basic Income di Era Pandemi COVID-19

---

YANU ENDAR PRASETYO

No 1, Vol 02 Agustus 2020 | Editor: Rinto Andhi S.

# Tentang IndoBIG Network

**Indonesian Basic Income Guarantee Network** atau IndoBIG Network merupakan jejaring intelektual, aktivis, pemerhati, dan periset Universal Basic Income (UBI) pertama di Indonesia. IndoBIG Network berdiri pada tanggal 27 Oktober 2017, ditandai dengan peluncuran [www.indobig.net](http://www.indobig.net) sebagai situs berbahasa Indonesia pertama yang khusus mengupas perkembangan gagasan UBI di tanah air. Jejaring kerja dan ruang lingkup IndoBIG bersifat lokal, nasional, hingga global.

IndoBIG Network terbuka bagi siapa saja yang berminat memperdalam pengetahuan, pengalaman, dan penelitian terkait dengan Basic Income di Indonesia maupun di dunia. Fokus dari IndoBIG Network adalah meninjau upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya, dan di negara-negara lain, serta memformulasikan solusi yang relevan dengan tantangan spesifik maupun umum dalam pengentasan kemiskinan, pengangguran, peningkatan kualitas hidup, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kemajuan teknologi dan pandemic COVID-19 sedang dan akan membawa kita pada wajah dunia yang baru dengan tantangan yang semakin berat. Oleh karena itu, mencari model-model penanggulangan kemiskinan yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan memperkecil jurang ketimpangan yang diakibatkan oleh ketidakadilan pembangunan itu sendiri. Cita-cita IndoBIG Network adalah mengembalikan martabat kemanusiaan, memperjuangkan kemerdekaan individu, serta mengurangi ketimpangan dan kemiskinan melalui **Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua**.

**Freedom, Dignity & Equality!**

# Tentang Working Paper Series

Kertas kerja IndoBIG Network ini merupakan ringkasan berbagai topik terkait Jaminan Penghasilan Dasar Universal yang disusun sebagai bahan diskusi dan edukasi publik serta pengembangan wacana UBI secara lebih luas. Kertas kerja IndoBIG Network dapat diunduh secara gratis dalam bentuk .pdf dan dapat didistribusikan secara bebas sepanjang untuk keperluan non komersial. Kertas kerja IndoBIG dapat berisi kumpulan tulisan atau bahasan khusus atas satu isu. Dalam kertas kerja No 1 Volume 2 ini, IndoBIG Network mengupas perkembangan UBI di masa Pandemi COVID-19 ini dari berbagai negara.

Saran dan masukan untuk kertas kerja ini dapat dialamatkan melalui email:

[indobignetwork@gmail.com](mailto:indobignetwork@gmail.com)

## **Kutipan dan sitasi untuk kertas kerja ini:**

Prasetyo, Yanu. (2020). "Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua (2): Basic Income di Era Pandemi COVID-19", Working Paper Series, IndoBIG Network, No 1, Vol 2, Agustus 2020

## Abstrak

Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua atau Universal Basic Income (UBI) menjadi topik hangat yang diperbincangkan di dunia internasional saat ini. Ada dua hal yang mendorong ketertarikan para pemimpin dunia maupun para ahli terhadap konsep ini. Pertama, kemajuan teknologi – seperti *artificial intelligence* (AI) – yang diprediksi akan menggantikan pekerjaan rutin, manual, dan bahkan kognitif manusia dalam waktu yang tidak lama lagi. Kedua, munculnya krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang tiba-tiba mengancam sendi-sendi kehidupan ekonomi maupun sosial seluruh bangsa dan negara tanpa kecuali. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Italia, termasuk negara-negara Eropa lainnya pun kewalahan dalam mencari solusi menghadapi pandemi ini. Melonjaknya angka pengangguran akibat teknologi dan pandemi ini, tentu saja memperdalam tingkat keparahan kemiskinan yang sebelumnya sudah cukup berat. Oleh karena itu, setiap negara sedang mencari solusi terbaik untuk meredam dampak dua hal tersebut. UBI kemudian muncul menjadi alternatif di tengah-tengah kepanikan ini. Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Brasil, Jerman dan negara-negara lain bahkan sudah dan sedang mencoba mengadopsi pendekatan ini. Sebelum mengupas lebih dekat perkembangan terbaru dalam implementasi UBI ini, ada baiknya kita melihat kembali eksperimen-eksperimen yang pernah ada sebelumnya. Dalam dua Working Paper Series ini (Vol 1 & 2), IndoBIG Network akan membedah dua pokok tersebut, dimulai dari pengertian UBI dan pro kontra yang mengikutinya, lalu dilanjutkan dengan eksperimen-eksperimen Basic Income yang pernah ada (Vol 1) dan perkembangan terkini terkait gagasan UBI tersebut di tengah pandemi COVID-19 (Vol 2).

# Daftar Isi

Tentang IndoBIG Network	1
Tentang Working Paper Series	2
Abstrak	3
Daftar Isi	4
Sistem Jaminan Sosial: Tinjauan Singkat	5
Mengapa Proyek Percontohan UBI Penting?	10
Hasil Percobaan <i>Basic Income</i> di Finlandia	13
Simulasi <i>Universal Basic Income</i> di China	15
<i>Basic Income</i> di Era Pandemi COVID-19	20
Bantuan Tunai Lebih Efektif Mengatasi Krisis	23
Usulan <i>Helicopter Money</i> di Uni Eropa	26
<i>The CARES Act</i> di Amerika Serikat	30
<i>Renda Basica Emergencial</i> di Brasil	35
Bantuan Tunai di Hong Kong	37
Bantuan Tunai di Jepang	38
Eksperimen <i>Basic Income</i> di Jerman	40
Usulan <i>Temporary Basic Income</i> (TBI) dari UNDP	41
COVID-19 & <i>Social Democratic Capitalism</i>	42
Daftar Pustaka	44
Tentang Penulis	45

# Sistem Jaminan Sosial: Tinjauan Singkat

## Konsep Jaminan Sosial

Mendiskusikan konsep jaminan sosial sebenarnya sama rumitnya dengan membahas praktek atau realitasnya di lapangan. Sebab, banyak konsep yang memiliki kesamaan nama atau istilah, namun berbeda penafsiran dan penerapannya di setiap negara. Sebagai contoh, konsep *social security* dan *social assistance* dipahami berbeda di AS dengan di negara-negara Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Walker, 2005).

Perbedaan definisi dan makna ini tentu berimplikasi pada perbedaan skema Jaminan Sosial di lapangannya. Ada puluhan skema berbeda di tiap-tiap negara. Skema ini pun terus berubah-ubah mengikuti dinamika politik, ekonomi, dan demografi masing-masing negara. Maka sangat lumrah jika *text book* tentang jaminan sosial ini cepat sekali "usang". Begitu sebuah buku atau jurnal baru tentang jaminan sosial terbit, substansi yang dibicarakan bisa jadi sudah hilang atau berganti bentuk dengan yang lainnya.

Menurut para sarjana *social policy*, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh rezim kesejahteraan yang dianut oleh negara tersebut. Setidaknya ada empat rezim kesejahteraan yang selama ini dikenal di dalam literatur jaminan sosial: (1) rezim liberal, (1) *social democratic*, (3) konservatif, dan (4) rezim alternatif lainnya.

Dalam rezim liberal, peran pasar adalah yang paling sentral. Bagi rezim *social democratic*, Negara-lah yang memiliki peran sebagai pengendali utama. Sementara itu, dalam rezim konservatif, keluarga dan komunitas (misalnya kelompok tani, kelompok militer, kelompok buruh, kelompok ilmuwan, dan lain-lain) menjadi pilar utama dalam sistem jaminan sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah *corporatism*.

Setiap rezim yang dianut ini tentu memiliki panduan dan mekanisme yang berbeda untuk memutuskan bentuk kongkrit kebijakannya. Untuk menguji ada pada posisi mana sebuah negara, maka kita bisa mengajukan tiga (3) pertanyaan mendasar:

1. Siapakah yang seharusnya mengelola dan menyelenggarakan jaminan sosial?

(a) Negara, (b) Pasar, atau (c) Masyarakat?

2. Apa bentuk jaminan sosial yang paling tepat untuk diberikan?

(a) uang tunai (*benefit in cash*),

(b) layanan dasar (*benefits in kind*, termasuk dalam bentuk program-program, kartu-kartu, voucher, dll),

(c) transfer pendapatan dari negara (*income transfer*) atau

(d) kombinasi ketiganya?

3. Apakah jaminan sosial akan diberlakukan secara (a) universal (kepada semua warga negara) atau (b) selektif (hanya menyasar kelompok tertentu)?

Dengan menjawab ketiga (3) pertanyaan di atas, kita akan mampu mengidentifikasi rezim kesejahteraan sebuah negara. Pun ketika kita ingin menawarkan sebuah rezim dan skema baru, seperti *Universal Basic Income* (UBI) atau Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua, maka kita tahu bagian mana dari skema jaminan sosial yang ada itu - baik secara hukum, filosofis, dan sosiologis - yang perlu dirombak dan diubah haluannya.

### **Tujuan, Sasaran, dan Fungsi Jaminan Sosial**

Dalam kondisi ideal, Sistem Jaminan Sosial setidaknya harus memiliki tiga hal pokok. *Pertama*, ia harus memiliki seperangkat tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*) yang diartikulasikan dengan jelas sehingga di dalamnya tertuang siapa sasaran penerima (kelompok target/populasi) dan apa manfaat bagi penerimanya? *Kedua*, sistem jaminan sosial yang baik harus memiliki badan atau organisasi administratif yang dipercaya untuk mempromosikan dan menjalankan sistem ini secara transparan. *Ketiga*, memiliki struktur yang akuntabel baik dari segi desain implementasi, pengawasan, hingga evaluasi dan sistem pendanaannya.

Tujuan yang dimaksud disini adalah seperangkat nilai yang disusun oleh otoritas atau kelompok tertentu – seperti negara, perusahaan, atau komunitas – yang merefleksikan niatan politik, cita-cita, gagasan, hingga kepentingan kelompok tersebut dalam menyusun sebuah Sistem Jaminan Sosial. Tujuan ini biasanya ambisius dan berguna sebagai landasan moral/rasional kolektif atau semacam *raison d’etre* dari sistem yang hendak dibangun tersebut.

Tujuan dan sasaran biasanya saling berkaitan erat. Namun sasaran sifatnya lebih kongkrit dan lebih mudah diidentifikasi karena berkaitan langsung dengan skema dan manfaat jaminan sosial tersebut. Sasaran ini biasanya disusun oleh eksekutif atau pengambil kebijakan yang lebih operasional. Sasaran ini juga dapat diartikan sebagai pernyataan politik dan biasanya ditampilkan dalam bentuk target berupa angka-angka atau jangka waktu tertentu secara eksplisit.

Selain memiliki tujuan dan sasaran, sebuah Sistem Jaminan Sosial juga harus memiliki fungsi yang dapat diidentifikasi dengan apa yang menjadi luarannya. Fungsi ini terkait dengan dampak yang diharapkan ketika sebuah kebijakan atau program diterapkan. Misalnya berupa perubahan dari sisi kesejahteraan maupun perilaku serta dampaknya pada individu, keluarga, hingga masyarakat yang ada di dalam yuridiksi Sistem Jaminan Sosial tersebut secara keseluruhan.

Sebuah Sistem Jaminan Sosial yang matang, biasanya memiliki lebih dari satu tujuan sekaligus. Setidaknya terdapat delapan (8) tujuan Sistem Jaminan Sosial yang paling sering mengemuka:

1. Mengentaskan kemiskinan.
2. Menjaga stabilitas pendapatan
3. Memperkuat kohesi sosial
4. Perlindungan terhadap resiko
5. Redistribusi dan keadilan sosial
6. Kompensasi
7. Efisiensi ekonomi
8. Mengubah perilaku masyarakat

## Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN): Asas, Tujuan, dan Prinsip<sup>1</sup>

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial, seperti Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS); Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Kementerian Pertahanan/TNI/Polri beserta keluarganya; Asuransi Kesehatan (Askes) bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis Kemerdekaan/Veteran dan anggota keluarganya; dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) untuk tenaga kerja swasta. Namun program jaminan sosial tersebut baru mencakup sebagian kecil masyarakat. Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Disamping itu, pelaksanaan pelbagai program jaminan sosial tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta.

Pemikiran mendasar yang melandasi penyusunan SJSN bagi penyelenggaraan jaminan sosial untuk seluruh warga negara adalah:

1. Penyelenggaraan SJSN berlandaskan kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang; sebagaimana tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) menetapkan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.”

2. Penyelenggaraan SJSN adalah wujud tanggung jawab negara dalam pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial; sebagaimana tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) menetapkan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

3. Program jaminan sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat; sebagaimana dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3), “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.”

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menyusun SJSN yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan pelbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh

<sup>1</sup> <https://djsn.go.id/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn> dikutip secara utuh dan diakses pada tanggal 7 Mei 2020 pukul 11.30 pm (central time, USA)



beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). SJSN diselenggarakan berdasarkan 3 (tiga) asas, yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Asas keadilan merupakan asas yang bersifat ideal. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

SJSN merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

SJSN diselenggarakan berdasarkan pada 9 (sembilan) prinsip:

1. **Kegotong-royongan**; prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.
2. **Nirlaba**; prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
3. **Keterbukaan**; prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.
4. **Kehati-hatian**; prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.
5. **Akuntabilitas**; prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. **Portabilitas**; prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Kepesertaan bersifat wajib**; prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
8. **Dana amanat**; bahwa iuran dan pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
9. **Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta**; bahwa hasil dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Secara umum, baik Jaminan Sosial di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah soal penyebaran akses informasi. Hasil kajian Pusat Penelitian Kependudukan LIPI (2009)<sup>2</sup> di enam (6) provinsi<sup>3</sup> menunjukkan bahwa keikutsertaan pekerja sektor informal dalam program jaminan dan perlindungan sosial ini masih rendah. Salah satu alasannya adalah minimnya informasi yang sampai kepada kelompok masyarakat di sektor informal ini, termasuk untuk masyarakat di pedesaan. Hasil penelitian LIPI menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat pedesaan terhadap program jaminan sosial pemerintah ini masih rendah, sehingga diperlukan strategi sosialisasi dan diseminasi yang lebih baik lagi, termasuk melakukan kajian secara menyeluruh mengingat tingkat segmentasi di sektor informal yang tinggi dan tingkat kerentanan yang berbeda-beda.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengakui bahwa manajemen dan perhitungan BPJS Kesehatan, misalnya, belumlah dilakukan dengan baik. Selama ini Pemerintah menanggung lebih dari 150 juta masyarakat yang masuk dalam PBI<sup>4</sup> pemerintah pusat sebanyak 96 juta dan PBI Pemerintah Daerah sebanyak 37 juta jiwa serta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau masyarakat biasa yang bukan pegawai pemerintah sebanyak 17 juta jiwa. Selain menanggung pembayaran tersebut, pemerintah juga masih terus menyuntikkan anggaran ke BPJS Kesehatan untuk menutupi defisitnya<sup>5</sup>.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan pun memberikan beberapa catatan untuk memperbaiki masalah tata kelola BPJS Kesehatan ini, antara lain: Masalah kepesertaan (sebanyak 26 juta) harus dibersihkan dan masuk ke dalam kelompok yang betul-betul miskin. Masalah kategorisasi di rumah sakit yang harus benar-benar sesuai. Selama ini banyak yang datang ke RS tidak sesuai kelasnya. Contoh, peserta bayar kelas III tapi ingin dilayani di kelas II atau bayar kelas II ingin dilayani di kelas I. Selain itu, Perbaiki hubungan dan tata kelola dengan lebih dari 2.500 rumah sakit dan 23 ribu puskesmas di seluruh Indonesia juga mendesak Unto diperbaiki.

Skema UBI memang belum tertuang dalam rumusan SJSN, namun bukan mustahil untuk diadopsi mengingat tujuan, sasaran, dan fungsi dasar dari UBI ini sejalan dengan SJSN. UBI dapat diadopsi sebagai pelengkap *di luar* maupun *di dalam* SJSN tersebut. Jika UBI berdiri sendiri di luar SJSN, maka UBI bersifat melengkapi skema jaminan sosial yang sudah ada. Penerima SJSN dapat mengikuti atau menerima keduanya. Namun jika UBI diadopsi sebagai pengganti atau berada di dalam SJSN, maka perlu banyak kajian dan perhitungan yang matang karena menyangkut sistem yang sudah berjalan. Jangan sampai adopsi UBI justru merugikan lebih banyak pihak yang selama ini sudah mendapat manfaat dari SJSN yang sudah ada.

---

<sup>2</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190906132702-4-97613/ya-ampun-begini-ternyata-kondisi-parahnya-bpjs-kesehatan>

<sup>3</sup> <http://lipi.go.id/siaranpress/lipi-petakan-permasalahan-jaminan-sosial-di-sektor-informal/21912>

<sup>4</sup> PBI adalah Penerima Bantuan Iuran, yaitu peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan

<sup>5</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190906132702-4-97613/ya-ampun-begini-ternyata-kondisi-parahnya-bpjs-kesehatan>

# Mengapa Proyek Percontohan UBI Penting?

## Proyek Percontohan *Basic Income*

Dalam penyusunan sebuah kebijakan, kita mengenal istilah “*evidence-based policy*”, yaitu sebuah kebijakan dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan dan bukti empiris di lapangan yang mendukung kebijakan tersebut. Untuk mendapatkan berbagai bukti empiris tersebut, kita memerlukan pendekatan yang disebut “*research-based policy*”, dimana kebijakan yang baik dan benar semestinya juga memiliki landasan ilmiah yang memadai. Dengan dua pedoman tersebut, maka dapat dikatakan pentingnya sebuah riset ilmiah untuk mengetahui apakah Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua memang layak dan tepat untuk dijadikan sebuah kebijakan?

Oleh karena itu, beberapa pegiat UBI sangat mendorong dilakukannya beragam *pilot project* percontohan UBI di berbagai negara berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara lebih pasti kendala-kendala di lapangan, mengamati lebih dekat penerimaan serta memastikan perubahan perilaku atau efek dari kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun di sisi lain, banyak juga aktivis UBI yang menganggap *pilot project* tidak harus dilakukan mengingat prinsip UBI sebagai bagian dari Hak Dasar setiap Manusia sudah cukup menjadi alasan untuk implementasi kebijakan ini.

## Landasan Moral dan Etis UBI

Dalam buku terbarunya, *Battling Eight Giants: Basic Income Now* (2020) Prof. Guy Standing berpendapat bahwa Universal *Basic Income* (UBI) itu penting karena alasan etika dan moral. UBI memang sering didengungkan sebagai kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Namun lebih dari itu, misi UBI tak lain adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kekayaan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini, sebenarnya adalah hasil jerih payah generasi yang datang sebelum kita. Kita menerimanya sebagai warisan sosial. Banyak sumber daya – yang berasal dari alam atau sosial – diwariskan secara turun temurun selama berabad-abad. Sayangnya, dalam perjalanan sejarah manusia, telah terjadi penjarahan terorganisir dan besar-besaran terhadap “*the commons*” milik bersama tersebut oleh segelintir kelompok (sebut saja para oligarki/penguasa/pengusaha/elit yang memiliki akses terbesar atas sumber daya itu).

Mereka yang telah menikmati untung besar dari penjarahan ini secara moral wajib untuk memberikan kompensasi kepada rakyat jelata (*the commons*) atas kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dari setiap aktivitas ekonomi mereka. Karena kita semua pada dasarnya adalah *the commons* itu sendiri, maka kompensasi harus dibayarkan kepada semua, sama rata dan tanpa syarat. Dorongan etis kedua adalah, berapa pun jumlahnya, penghasilan dasar atau UBI akan meningkatkan kebebasan pribadi dan masyarakat. UBI akan memperkuat kemampuan orang untuk mengatakan ‘tidak’ kepada majikan yang eksploitatif atau menindas dan untuk menghentikan hubungan sosial atau kontrak kerja yang merugikan. Inilah yang sering disebut sebagai “*republican freedom*”, yaitu kemampuan individu untuk membuat keputusan tanpa harus meminta izin dari orang-orang yang duduk di posisi kekuasaan.

Justifikasi etis ketiga adalah bahwa UBI akan memberikan keamanan dasar bagi setiap individu penerima, keluarganya, serta komunitas mereka. Keamanan (*security*), menurut Guy Standing, adalah "*natural public good*". Kurangnya rasa aman dan keamanan ini akan mengurangi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan rasional dan bahkan dapat menjadi ancaman serius bagi diri sendiri maupun komunitas. Penghasilan dasar universal juga akan memperkuat solidaritas sosial dan hubungan antar manusia. UBI akan menjadi simbol bahwa kita semua adalah bagian dari satu bangsa dimana setiap anggotanya mampu berbagi manfaat dari kekayaan nasional yang digerakkan secara kolektif. Sangat penting untuk menghidupkan kembali etos solidaritas sosial yang telah terkikis dalam beberapa dekade terakhir oleh individualisme dan persaingan yang berlebihan.

Meskipun UBI dibayarkan secara individual, tidak berarti individualistis. Tidak seperti bantuan sosial umumnya, pendapatan dasar universal akan mencegah pembelahan antara 'kami' dan 'mereka' serta mengkonfirmasi bahwa kita semua memiliki nilai yang sama. Ketika UBI dibayarkan sama kepada semua individu, manfaatnya juga bersifat sosial karena mampu meningkatkan hubungan intra-keluarga, kohesi komunitas, dan solidaritas nasional. Secara ringkas, menurut Guy Standing, UBI dianggap mampu mengobati setidaknya delapan (8) penyakit kronis yang selama ini dianggap menghambat terwujudnya *Good Society: inequality, insecurity, debt, stress, precarity, automation, populism, and extinction (ecological crisis)*.

### Skema Dasar *Basic Income*

Dalam rancangan percobaan *Basic Income*, sebaiknya desain dan penentuan jumlah uang tunai yang akan diberikan dapat mengikuti beberapa prinsip di bawah ini (Standing, 2017):

- Bentuk jaminan berupa uang tunai
- Dibayarkan kepada individu, bukan keluarga, rumah tangga, atau kelompok
- Jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup paling dasar individu tersebut disesuaikan dengan ukuran-ukuran lokal atau nasional
- Dibayarkan secara regular dengan jumlah yang stabil. Hal ini akan memberikan harapan yang pasti bagi penerima untuk mengatur jaminan penghasilan yang akan diperolehnya.
- Hak dasar setiap orang. Jaminan Penghasilan dasar atau *Basic Income* adalah hak semua dan bukan untuk kalangan tertentu saja, misal hanya orang miskin. Sekalipun kemiskinan adalah musuh terbesar yang ingin disasar, namun pendekatan dalam Jaminan Penghasilan Dasar adalah model inklusif, bukan eksklusif. Disamping itu, menetapkan target dan seleksi biasanya akan membuat banyak peluang kesalahan, korupsi, nepotisme, dan konflik atau kecemburuan sosial.
- Penerima tidak perlu menunjukkan dokumen atau persyaratan diluar bukti bahwa dia adalah warga negara yang sah atau telah tinggal di wilayah itu dalam waktu tertentu
- Kebijakan tidak boleh berubah-ubah, sebab stabilitas, konsistensi, dan transparansi adalah modal utama untuk keberlanjutan jaminan sosial dasar ini.

Selain prinsip di atas, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah proyek percontohan:

**Ketersediaan Anggaran.** Jumlah anggaran yang tersedia, baik yang dikumpulkan oleh pemerintah maupun non-pemerintah (*crowd-funding*, swasta, yayasan, dll) sangat menentukan

keberlanjutan proyek percobaan UBI ini. Jumlah anggaran ini akan mempengaruhi durasi percobaan, jumlah penerima, serta evaluasi dampak ekonomi dan sosial yang diharapkan.

**Ketimpangan antar wilayah.** Apakah percontohan dibuat untuk skala Nasional, Provinsi, Kab/Kota, atau Desa dan Komunitas? Setiap skala di atas memerlukan perhitungan yang berbeda, khususnya untuk negara atau wilayah dengan ketimpangan ekonomi yang masih lebar seperti Indonesia.

Untuk menghitung perkiraan kemampuan pemerintah Kab/Kota dalam menyelenggarakan percobaan Jaminan Penghasilan Dasar, dapat dilakukan simulasi melalui: <http://indobig.net/kalkulator/>

### **Durasi Proyek Percontohan UBI**

Dampak sebuah proyek percontohan biasanya akan menjadi patokan bagi negara lain untuk menimbang apakah kebijakan *Basic Income* ini layak atau tidak diterapkan di negara mereka? Ada banyak dampak jangka pendek maupun panjang dari *Basic Income* yang bisa dilihat melalui riset. Efek itu sendiri memiliki beragam bentuk. Ada yang disebut dengan “*impact effect*”, yaitu dampak langsung yang dihasilkan seketika pembayaran pertama diterima oleh partisipan. Kedua, dampak asimilasi (*assimilation effect*) yaitu dampak ketika peserta telah terbiasa menerima *basic income*. Efek lainnya adalah *wearing off effect* dan *learning effect*, yakni efek UBI dalam jangka agak panjang ketika UBI mulai menjadi bagian penting dari kehidupan partisipan. Oleh karena itu, durasi *pilot project* atau pembayaran UBI sebaiknya minimum satu tahun (12 bulan) sehingga penelitian dapat melihat efek jangka pendek maupun panjang dari eksperimen ini. Percobaan UBI Kenya adalah contoh menarik yang menggabungkan efek jangka pendek dengan nominal besar (satu kali pembayaran/*lump sum*) dengan jangka panjang dengan nominal pembayaran lebih kecil (hingga 12 tahun pembayaran). Sementara itu percobaan di Ontario, Kanada dan Finlandia masing-masing adalah 2 tahun. Percobaan *Basic Income* di Jerman direncanakan selama 3 tahun.

# Hasil Eksperimen *Basic Income* di Finlandia

Eksperimen Jaminan Penghasilan Dasar telah dijalankan di Finlandia selama dua tahun (2017-2018). Dalam percobaan tersebut, 2.000 orang pengangguran yang dipilih secara acak berusia antara 25 dan 58 tahun menerima pembayaran bulanan sebesar € 560, tanpa syarat dan tanpa tes. Untuk mengevaluasi efek dari program tersebut, sebanyak 2.000 orang kelompok penerima program dibandingkan terhadap kelompok kontrol yang terdiri dari 173.000 orang yang tidak menerima pembayaran *Basic Income*. Eksperimen ini diluncurkan untuk lebih memahami bagaimana dampak jaminan penghasilan dasar terhadap status pekerjaan dan kesejahteraan para peserta.

Dalam laporan akhir yang terbit tanggal 6 Mei 2020<sup>6</sup> tersebut, tim peneliti mempelajari dampak *Basic Income* dari berbagai perspektif dengan beragam sumber data. Pertama, efek ketenagakerjaan dari pendapatan dasar dievaluasi dalam berbagai analisis statistik. Kedua, dampak percobaan pada kesejahteraan subjektif dianalisis dari hasil data survei yang dikumpulkan menjelang akhir percobaan. Ketiga, studi kualitatif berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan penerima program juga digunakan untuk menjelaskan detail kehidupan mereka sehari-hari setelah menerima *Basic Income*. Keempat, liputan media tentang eksperimen ini dan beragam opini populer tentang pendapatan dasar juga dianalisis menjadi dua studi tambahan lainnya. Evaluasi eksperimen pendapatan dasar di Finlandia ini dilakukan oleh Kela bersama dengan *VATT Institute for Economic Research*, *University of Turku*, *University of Helsinki*, *Labour Institute for Economic Research*, *the Finnish Association for Mental Health* dan *think-tank Tänk*.

Berikut ini adalah beberapa catatan dari hasil eksperimen *Basic Income* di Finlandia:

## **Jumlah Rata-Rata Hari Kerja Meningkat**

Meskipun pada laporan awal menunjukkan tidak ada pengaruh ketenagakerjaan yang signifikan selama tahun pertama percobaan, pada periode pengamatan keseluruhan (November 2017 hingga Oktober 2018), terlihat dampaknya berupa peningkatan hari kerja dengan rata-rata sekitar enam (6) hari lebih banyak pada kelompok penerima *Basic Income* dibanding dengan kelompok kontrol (mereka yang tidak menerima *Basic Income*). Pada tahun 2018, terjadi amandemen UU tentang tunjangan pengangguran di Finlandia. Tim peneliti menyimpulkan bahwa efek positif terhadap ketenagakerjaan di tahun kedua ini adalah efek gabungan dari *Basic Income* dan amandemen UU tunjangan pengangguran tersebut.

## **Kesejahteraan Subjektif Meningkat**

Gambaran tentang kesejahteraan subyektif diperoleh dari hasil survei yang mencakup pertanyaan tentang kesejahteraan sosial, kondisi finansial, status kesehatan (subjektif), aktivitas pencarian kerja, dan sikap umum responden terhadap *Basic Income*. Survei ditargetkan pada

---

<sup>6</sup> <http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162219>

2.000 orang penerima pendapatan dasar dan 5.000 orang dari kelompok kontrol. Tingkat responnya (*response rate*) sebesar 31% pada kelompok penerima dan 20% pada kelompok kontrol.

Secara umum, kelompok penerima *Basic Income* menilai kesejahteraan mereka lebih positif daripada responden dalam kelompok kontrol. Penerima *Basic Income* mengalami lebih sedikit stres dan gejala depresi dibanding kelompok kontrol. Selain itu, kesejahteraan finansial penerima *Basic Income* juga dilaporkan lebih baik. Mereka mengaku lebih mampu membayar tagihan mereka tepat waktu.

Tingkat kepercayaan diri penerima *Basic Income* juga lebih tinggi. Tingkat kepercayaan mereka terhadap orang lain dan lembaga sosial juga lebih tinggi dibandingkan dengan responden kelompok kontrol. Selain itu, mereka juga merasa lebih percaya diri terhadap kemungkinan masa depan mereka dan merasakan proses birokrasi yang lebih pendek selama menerima *Basic Income*.

### **Aspek Ekonomi dan Kisah Pribadi Lebih Menonjol Dalam Liputan Media**

Eksperimen Finlandia ini menarik minat dan perhatian yang sangat besar di seluruh dunia. Banyak sekali liputan media pada eksperimen Finlandia ini, baik sebelum, selama maupun setelah percobaan. Analisis media menunjukkan bagaimana media internasional membingkai eksperimen ini dan bingkai mana yang paling menonjol? Data terdiri dari artikel yang diterbitkan di media-media Nasional (Finlandia) dan Internasional. Lima bingkai yang berbeda berhasil diidentifikasi: bingkai ekonomi, bingkai masa depan, bingkai konflik, kerangka personal (*human-interest*), dan kerangka politik. Kerangka yang paling menonjol dalam data adalah kerangka ekonomi. Kisah-kisah personal para penerima *Basic Income* juga cukup dominan mewarnai keseluruhan liputan media tentang eksperimen Finlandia ini.

### **Dukungan Publik Terhadap *Basic Income***

Sikap publik terhadap *Basic Income* ini diukur melalui survei populasi. Hasilnya, **46% responden setuju atau agak setuju bahwa *Basic Income* harus diperkenalkan sebagai bagian permanen dari sistem jaminan sosial Finlandia.** Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ketidakamanan di pasar tenaga kerja memiliki hubungan yang kuat dengan besarnya dukungan terhadap *Basic Income* ini. Lebih rinci, responden pendukung partai-partai politik yang mempromosikan *Basic Income* memang cenderung memandang bahwa kesulitan finansial dan rasa tidak aman (*insecurity & uncertainty*) terhadap pasar tenaga kerja ini lebih tinggi dibandingkan dengan pendapat responden pendukung partai lain yang kurang setuju terhadap *Basic Income*.

# Simulasi *Universal Basic Income* di China

Empat dekade setelah reformasi, China telah membuat lompatan sejarah yang luar biasa. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, menurut IMF, China telah berkontribusi hampir 39 persen pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2016. Dari tahun 1990 hingga tahun 2011, sekitar 400 juta orang diklaim telah terangkat dari garis kemiskinan (dihitung dengan garis kemiskinan \$1,25 per hari). Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 10 juta penduduk pedesaan berhasil keluar dari kemiskinan setiap tahunnya (UNDP, 2019).

China juga memiliki populasi dan sumber tenaga kerja terbesar di dunia. Pada tahun 2030 nanti, China diperkirakan memiliki 1 miliar penduduk perkotaan (70 persen dari total populasi). Pada 2050, populasi di atas usia 65 akan mencapai 31 persen dari total penduduk. Perkembangan seperti ini tidak hanya menghadirkan peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang tak mudah. Menegosiasikan transisi semacam itu akan membutuhkan jaminan sosial yang kuat sebagai sistem pengaman bagi masyarakat di negeri tirai bambu ini.

Pandemi, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi yang terus melebar telah mendorong para pembuat kebijakan di China untuk menemukan solusi kebijakan yang inovatif. Sehubungan dengan masalah ini, gagasan *Universal Basic Income* (UBI) dianggap sebagai salah satu alternatif yang menarik. UBI dianggap bisa menjadi komponen kebijakan baru dari sistem jaring pengaman sosial dan redistribusi pendapatan di China.

Konsep UBI sendiri masih relatif baru untuk China. Untuk lebih mendalami gagasan ini, UNDP dan Lembaga penelitian dari *Beijing Normal University* meluncurkan studi inovatif untuk menganalisis prospek kebijakan dan tantangan implementasi UBI di China dari perspektif ekonomi dan perilaku sosial<sup>7</sup>. Studi ini menghasilkan data yang cukup menjanjikan, terutama karena kajian ini mengadopsi pendekatan **survei tradisional** dan **game online** untuk menjelajahi preferensi publik terhadap UBI.

Secara umum, laporan tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar orang China memiliki preferensi tinggi untuk UBI. Namun demikian, China belum siap untuk mengimplementasikan kebijakan UBI ini dalam jangka pendek, terutama karena kekuatan ekonomi dan prioritas yang belum mendukung. Meskipun demikian, China dapat mempertimbangkan untuk melakukan proyek percontohan di area tertentu dan melanjutkan dialog tentang bagaimana UBI dapat masuk ke dalam sistem perlindungan sosial yang telah ada dan yang mungkin terjangkau secara fiskal.

## **Fokus Kajian UBI di China**

Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur dampak kebijakan adalah dengan model prediksi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, eksperimental maupun teoritis. Sayangnya, sebagian besar model prediksi ini dianggap rapuh, terutama karena mereka berakar pada satu disiplin ilmu saja dan fokus pada aspek tunggal. Banyak para

---

<sup>7</sup> <https://www.cn.undp.org/content/china/en/home/library/innovation-/universal-basic-income-in-china.html>



sarjana telah menggarisbawahi bahwa model ekonometrik tradisional sulit membantu memahami sisi “tidak rasional” dari kinerja ekonomi.

Implementasi UBI sendiri juga sering dibahas dari perspektif "rasional" ini — dengan upaya untuk memperkirakan hasil kebijakan mengikuti teori matematika dan ekonomi yang canggih. Padahal, beberapa masalah terkait perilaku, seperti motivasi bekerja dan sentimen seputar keadilan sosial, bukanlah sesuatu yang murni rasional. Dengan kata lain, logika ekonomi hanya dapat membantu menjelaskan beberapa aspek dari hasil kebijakan. Oleh karena itu, juga harus dipertimbangkan penjelasan sosial dan perilaku individu.

Pengambilan keputusan individu seringkali bersifat kontekstual. Terlebih ketika orang membuat keputusan di mana mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya (seperti skema UBI), maka mereka cenderung mengandalkan kepercayaan sebelumnya yang sangat dipengaruhi oleh hegemoni kultur dan budaya setempat. Budaya sendiri sebenarnya adalah "pemrograman pikiran kolektif" yang dapat kita gunakan untuk menangkap esensi dari berbagai kepercayaan, adat istiadat, tata krama, ritual, dan tradisi yang orang ikuti dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam dekade terakhir, sejumlah studi telah berusaha untuk menghubungkan budaya dengan ketimpangan pendapatan, sistem pajak, tingkat pertumbuhan, kekayaan bangsa dan perilaku konsumen (Schwidetzky dan Eicke, 2015). Hal ini tidak mengejutkan, mengingat penjelasan budaya bukanlah sebuah fenomena baru. Kedua ekonom klasik seperti Adam Smith (1759) dan John Stuart Mill (1843), serta ekonom non-tradisional seperti Banfield (1958) dan Hirschman (1967) semuanya berusaha untuk melihat faktor budaya di dalam teori mereka. Baru-baru ini minat dalam memahami unsur-unsur psikologis dalam pengambilan keputusan ekonomi telah memberikan kontribusi lebih lanjut pada meningkatnya peran sosial dan budaya. Laporan studi UNDP dan Beijing Normal University ini merupakan upaya penting untuk mengaitkan proyeksi implementasi UBI kaitannya dengan nilai-nilai budaya lokal.

## Hasil Studi

Studi dari UNDP China ini telah berhasil mewawancarai sekitar 1.130 rumah tangga. Survei yang dilakukan mencakup 800 rumah tangga perkotaan dan mengumpulkan sebanyak 2.040 sampel penduduk. Disamping wawancara dan survey, studi ini juga membuat *game online* bernama "24 bulan". Game ini dirancang berdasarkan kuesioner survey. Pemain di dalamnya dapat mengontrol "kehidupan" dari karakter yang dihasilkan. Pemain memiliki kendali atas pilihan karakter yang terkait dengan karir, keluarga dan teman, dan menghabiskan waktu dan uang.

Pilihan tercermin dalam perubahan kesehatan, kebahagiaan, hubungan keluarga, status karier, dan lain-lain yang masing-masing diwakili oleh persentase. Setelah periode waktu yang ditentukan, karakter akan secara acak mendapatkan jatah bulanan dalam bentuk UBI. Dengan cara ini, tim peneliti berharap untuk melihat apakah para pemain akan mengubah perilaku mereka setelah menerima jatah UBI atau tidak. Hasil studi dari survey dan permainan ini cukup menarik:

- Responden dengan pendapatan tahunan lebih tinggi cenderung kurang tertarik menerima UBI
- Responden dengan kualifikasi akademik yang lebih tinggi juga cenderung kurang tertarik menerima UBI.

- Responden dengan jam kerja lebih lama (per minggu) kurang bersedia menerima UBI
- Responden dengan beban keluarga yang berat lebih cenderung bersedia untuk menerima UBI.
- Pengeluaran tahunan dasar rumah tangga tidak memiliki dampak yang jelas pada kesediaan untuk menerima UBI.
- Kelompok berpendapatan tinggi cenderung menginginkan UBI yang lebih rendah daripada UBI kelompok berpenghasilan terendah.
- Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam preferensi untuk jumlah UBI di antara orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda.
- Responden yang bekerja lebih lama lebih memilih jumlah UBI yang besarnya lebih rendah.
- Keluarga dengan tanggungan muda lebih suka pembayaran UBI lebih tinggi.
- Orang dengan pendidikan tinggi cenderung menikmati lebih banyak waktu luang.
- Mereka yang memiliki jam kerja lebih pendek dan lebih rendah pendapatan tahunannya, cenderung memilih untuk mengurangi jam kerja mereka
- Individu dengan pendapatan tahunan di atas 120.000 RMB memiliki probabilitas lebih tinggi untuk memilih UBI.
- Individu dengan gelar sarjana muda atau pendidikan tinggi secara signifikan lebih mungkin untuk memilih UBI.
- Individu yang telah bekerja lebih dari 10 bulan dalam setahun secara signifikan lebih cenderung memilih UBI.
- Beban keluarga tidak secara signifikan mempengaruhi pilihan UBI dan tunjangan subsisten.
- Individu dengan pengeluaran rumah dasar antara 50.000 RMB dan 80.000 RMB cenderung memilih UBI.

Selain masalah kekhasan budaya, Implementasi UBI juga menghadapi tantangan lainnya. Pertama, sumber dana. Meskipun pembiayaan untuk sebagian besar proyek percontohan UBI memiliki berasal dari dana fiskal independen, yayasan atau LSM, begitu kebijakan dipromosikan ke seluruh masyarakat, dibutuhkan dana tetap dalam jumlah yang besar. Kedua, apakah UBI ini akan menjadi program pengganti atau pelengkap? Setelah beberapa dekade pembangunan, China telah membangun sistem jaminan sosial dasar, termasuk sistem tunjangan subsisten dan kebijakan pengentasan kemiskinan lainnya. Kebijakan ini memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mengurangi kemiskinan dan penyempitan kesenjangan pendapatan. Pertanyaannya adalah, apakah implementasi UBI berarti alternatif dari kebijakan serupa ini atau apakah itu hanya menjadi pelengkap kebijakan?

Dengan tunjangan subsisten, tantangan untuk mengidentifikasi keluarga berpenghasilan rendah tidak diragukan lagi akan menambah kesulitan implementasi dan membengkaknya biaya administrasi. Jika prosedur peninjauan dapat disederhanakan dengan langsung menggunakan nomor ID pribadi sebagai identitas tunggal, maka pemerintah pusat dan daerah dapat dilepaskan dari kerumitan administrasi ini. Dengan demikian, UBI bisa jadi alternatif yang baik. Namun sayangnya, kesenjangan pendapatan dan biaya hidup antar daerah juga masih cukup lebar. Efek sirkulasi dari UBI di daerah kaya (pesisir timur) bisa jauh berbeda dengan di daerah miskin (barat laut). Hal ini juga menjadi masalah yang perlu perhatian serius ketika ingin membuat desain implementasinya.

## Kesimpulan

Secar garis besar, studi tentang penerimaan dan simulasi penerapan UBI di China ini menyimpulkan bahwa:

- Saat ini, penerapan UBI di Cina belum efisien secara ekonomi dan masih akan menghadapi kendala fiskal yang serius. Di luar alasan ekonomi, budaya tradisional sepertinya memiliki efek yang besar berdampak pada reaksi orang-orang terhadap kebijakan UBI.
- Kebijakan tunjangan subsisten Tiongkok masih lebih ekonomis dibanding UBI. Jika dana tunjangan subsisten digunakan untuk menyediakan UBI untuk semua orang, pendapatan per kapita akan menjadi hanya sebesar 244 RMB per tahun, jelas tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar. Jika UBI dikeluarkan untuk seluruh populasi sesuai dengan standar dari tunjangan subsisten, maka pengeluaran negara akan menjadi 25 kali lipat dari tunjangan subsisten.
- Budaya kerja keras dapat membantu mengurangi dampak disinsentif terkait pekerjaan, khususnya di antara kelompok yang lebih berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Hampir setengah dari responden yang memilih untuk mempertahankan pekerjaan mereka setelah menerima UBI, dengan alasan seperti karier yang lebih tinggi dan keinginan untuk terus meraih prestasi.
- Nilai-nilai budaya tradisional yang berpusat pada keluarga dapat memperburuk efek disinsentif pada pekerjaan sampai batas tertentu. Responden dengan beban keluarga yang lebih berat yang menerima UBI cenderung mengalihkan lebih banyak waktu dari pekerjaan ke keluarga. Namun, sebagian besar responden juga mengalokasikan lebih banyak uang untuk dukungan keluarga setelah menerima UBI, dengan fokus pada pendidikan untuk anak-anak dan merawat orang tua.
- Faktor budaya yang menekankan *guanxi* (koneksi pribadi) dan *mianzi* (reputasi) dapat menjadikan UBI alternatif yang disukai. *Mianzi* menentukan identifikasi orang dalam sistem sosial (prestise, status dan pengakuan sosial). Akibatnya, mereka yang menerima tunjangan subsisten dapat dilabeli sebagai "miskin", yang terlihat tidak dapat ditoleransi oleh orang-orang Cina yang menghargai *mianzi* dalam hubungan sosial mereka.
- Menariknya, data yang dikumpulkan melalui aplikasi game menunjukkan bahwa para pemain cenderung untuk menyimpan sebagian besar uang UBI mereka, mencerminkan preferensi orang China untuk menabung. Data dari permainan juga mencerminkan data survei dalam hal kebiasaan kerja dan kecenderungan untuk tetap mempertahankan pekerjaan yang dimiliki saat meski nantinya menerima UBI. Hal ini menunjukkan bahwa eksperimen melalui permainan memiliki potensi bagus untuk studi di masa depan sebagai pelengkap teknik survei tradisional.

## **Rekomendasi**

*Jangka pendek:* Meskipun sebagian besar responden menunjukkan preferensi untuk UBI, namun kenyataannya adalah bahwa kondisi untuk menerapkan UBI di Cina ini saat ini belumlah tepat. Ekonomi China belum cukup kuat untuk mendukung kebutuhan dana yang sangat besar. Ketimpangan regional juga masih menimbulkan kesulitan. Menggunakan dana terbatas di area yang paling dibutuhkan adalah pilihan untuk mengoptimalkan efisiensi modal. UBI di China masih perlu proses diskusi dan analisis yang intensif, ditambah dengan analisis yang cermat tentang bagaimana faktor budaya China akan mempengaruhi perilaku penerima UBI ini.

*Jangka panjang:* UBI telah terbukti efektif dalam mempromosikan keadilan sosial dalam banyak percobaan. Hal ini dianggap sebagai sarana yang bermanfaat untuk melakukan redistribusi dan menutup kesenjangan pendapatan. UBI dapat menjadi terobosan penting untuk melengkapi kekurangan tunjangan subsisten dan sistem bantuan sosial lainnya. UBI dapat membantu orang untuk mengembangkan potensi diri sejalan dengan tren perkembangan manusia di masa depan.

## *Basic Income* di Era Pandemi COVID-19

Wabah virus Korona atau dikenal dengan COVID-19 yang melanda dunia saat ini bukan hanya menandakan krisis besar di sektor kesehatan, namun juga telah mendorong dunia ke arah krisis ekonomi yang diperkirakan juga akan menyebabkan terjadinya resesi global. Menurut IMF dan Bank Dunia (2020), ada empat alasan utama yang menyebabkan krisis COVID-19 ini mampu menyebabkan resesi ekonomi:

*Pertama*, melemahnya “mesin-mesin” utama perekonomian dunia seperti Amerika Serikat, China, dan Eropa. Menurut prediksi *Goldman Sachs*, pertumbuhan ekonomi China akan turun hingga -9% pada kuartal pertama 2020 dan -6% untuk PDB AS pada kuartal kedua 2020. Penurunan ini jauh lebih buruk dibanding situasi krisis ekonomi 2008 yang lalu.

*Kedua*, penyebaran virus ini bukan hanya berpengaruh pada pusat-pusat ekonomi global, namun juga menyebar ke seluruh negara di dunia. Harga-harga komoditas akan turun, termasuk harga minyak bumi yang sudah mencapai 0 atau negatif – pertama kali dalam sejarah dunia<sup>8</sup>.

*Ketiga*, hampir seluruh negara di dunia akan terpukul oleh COVID-19 ini dan mereka harus menyiapkan biaya langsung yang tidak sedikit untuk memeranginya, terutama untuk sektor kesehatan, jaminan sosial, dan biaya-biaya terkait ketidakpastian ekonomi lainnya (biaya tidak langsung) seperti meningkatnya pengangguran, turunnya produktivitas ekonomi, dan lain-lain.

*Keempat*, jika penanganan pandemi COVID-19 ini tidak berhasil atau tidak dilakukan dengan serius, maka dampak lanjutannya adalah akan terjadi krisis finansial di dunia perbankan, turunnya sektor-sektor terkait (pariwisata, penerbangan, perhotelan, dan lain-lain), dan krisis ekonomi makro sebagai puncaknya.

Kondisi *shock* di atas kemudian menyebabkan perekonomian dunia membeku (*freeze*) atau cenderung berhenti untuk waktu yang tidak pasti. Hal ini terjadi karena tiba-tiba penawaran barang dan jasa menurun bersamaan waktunya dengan permintaan. Produsen berhenti memproduksi karena adanya pembatasan sosial dan penutupan pabrik-pabrik untuk mencegah penyebaran virus, sementara di sisi lain konsumsi dan daya beli konsumen juga menurun karena setiap orang terpaksa mengisolasi diri di rumah masing-masing. Kelas menengah dan ekonomi bawah adalah yang paling terpukul dengan kondisi semacam ini.

Meningkatnya angka kematian (*mortality*) dan kecenderungan terkena penyakit (*morbidity*) telah menyebabkan penurunan aktivitas kerja dan produktivitas ekonomi. Pembatasan fisik dan sosial juga menambah berat situasi. Sayangnya, tidak semua negara akan mampu melakukan mitigasi secara berkelanjutan (*sustainable mitigation*) seperti tes massal, karantina, dan perawatan di rumah sakit mengingat fasilitas kesehatan publik, kapasitas fiskal, kondisi ketenagakerjaan,

---

<sup>8</sup> <https://www.cnbc.com/2020/04/26/why-oil-prices-went-negative-and-why-they-can-go-negative-again.html>

dan tata kelola pemerintahan yang berbeda-beda. Bank Dunia memperkirakan banyak negara berkembang yang akan kesulitan menghadapi perang melawan COVID-19 ini.

Kondisi di negara-negara berkembang juga menjadi sorotan utama dunia Internasional. Mengingat jumlah populasi yang padat dan infrastruktur yang lebih terbatas dibanding dengan negara-negara maju. Bank Dunia memperkirakan bahwa negara berkembang yang mengandalkan ekonominya pada perdagangan dan pariwisata akan sangat terpukul dengan COVID-19 ini. Termasuk negara berkembang yang selama ini bertumpu pada komoditas ekspor, perdagangan, dan *remittances* dari luar negeri.

Setidaknya ada empat hal utama yang menyebabkan negara berkembang akan kesulitan menghadapi perang melawan COVID-19 ini. *Pertama* adalah sistem dan kapasitas kesehatan yang rendah. Banyak penduduk di negara berkembang yang belum terjangkau dengan fasilitas kesehatan primer. Bahkan jika fasilitas kesehatan seperti rumah sakit itu ada, peralatan di dalamnya masih belum mendukung, seperti ketersediaan ventilator, alat pelindung diri (APD), dan ruang rawat inap. *Kedua*, besarnya tenaga kerja informal yang tergantung pada pekerjaan harian. Mereka yang bekerja di sektor informal ini adalah pihak yang paling terpukul ketika kebijakan pembatasan sosial atau karantina wilayah diterapkan. Jumlahnya luar biasa besar. Kelompok ini rentan mengalami kelaparan karena kehilangan pendapatan harian.

*Ketiga*, ruang fiskal yang terbatas. Negara berkembang biasanya memiliki ruang fiskal yang sempit. Banyak korporasi, orang kaya, dan warga negara yang tidak patuh membayar pajak menyebabkan sumber pendapatan negara yang penting ini menjadi sangat terbatas. *Keempat*, tata kelola yang belum transparan dan efektif. Birokrasi yang gemuk, data yang tumpang tindih, dan budaya korupsi menjadi faktor utama buruknya tata kelola di negara-negara berkembang. Kondisi ini tentu menghambat penanganan COVID-19 yang butuh kecepatan ekstra. Penegakan hukum dan regulasi yang lemah semakin melengkapi tantangan berat yang dihadapi oleh negara berkembang.

### **UBI dan Kelompok Rentan COVID-19**

*International Labour Organization (ILO)* memperkirakan tingkat pengangguran global akan meningkat antara 5,3 juta hingga 24,7 juta pada tahun 2020 ini. Sebagai perbandingan, krisis keuangan global tahun 2008 yang lalu juga telah berdampak pada naiknya tingkat pengangguran hingga 22 juta. Meskipun perkiraan ini berasal dari data prediksi dan simulasi, namun tren yang ada memang menunjukkan kenaikan substansial dalam pengangguran global. Disamping naiknya angka pengangguran, pekerjaan di sektor informal juga cenderung mengalami peningkatan tajam selama krisis berlangsung.

Penurunan aktivitas ekonomi dan pembatasan aktivitas sosial juga telah secara nyata berdampak pada industri jasa dan manufaktur. Data terbaru dari China<sup>9</sup> menunjukkan bahwa total nilai tambah perusahaan industri manufaktur di Tiongkok ini turun 13,5 persen selama dua bulan pertama tahun 2020. Pasokan tenaga kerja ini menurun disebabkan oleh kebijakan karantina dan penurunan kegiatan ekonomi secara umum. Kerugian terbesar tentu dihadapi oleh kaum buruh dan pekerja. Menurut perhitungan ILO, nilai kehilangan pendapatan para pekerja ini berkisar antara 860 hingga 3.440 miliar USD.

---

<sup>9</sup> [http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202003/t20200316\\_1732244.html](http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202003/t20200316_1732244.html)

Hilangnya pendapatan tenaga kerja ini akan berimbas langsung pada konsumsi barang dan jasa yang turun. Bukan hanya konsumsi akan menurun, namun para pekerja ini juga rentan jatuh dalam kategori miskin atau hidup di bawah garis kemiskinan. Sayangnya, krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi ini kemudian diperparah oleh ketimpangan sosial ekonomi yang sebelumnya sudah sangat dalam. Dampak ekonomi COVID-19 ini menjadi tidak proporsional pada segmen populasi tertentu, yaitu bagi mereka yang termasuk kelompok paling rentan. ILO mengidentifikasi setidaknya ada lima (5) kelompok masyarakat yang paling terpuak dengan adanya Pandemi COVID-19 ini.

*Pertama*, mereka yang memiliki masalah kesehatan dan berusia lanjut. Golongan pertama ini lebih terancam keselamatan jiwanya lebih daripada kelompok sosial yang lain. Keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan kapasitas atau akses perawatan kesehatan menyebabkan sulitnya penanganan untuk kelompok pertama ini.

*Kedua*, kelompok usia produktif. Jika kelompok usia lanjut terancam dari sisi daya tahan kesehatan dan penanganan penyakitnya, maka mereka yang masuk golongan muda terancam menjadi pengangguran terbuka dan terselubung. Kelompok kedua ini lebih rentan terhadap penurunan permintaan tenaga kerja sebagai efek dari penurunan aktivitas ekonomi global. Mereka yang masih bertahan di pasar tenaga kerja pun terancam penurunan jam kerja yang berimbas pada penurunan penghasilan.

*Ketiga*, kelompok perempuan. Banyak perempuan yang bekerja di garda depan penanganan COVID-19 ini yang terancam keselamatan jiwanya, seperti para suster, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Jumlah perempuan yang bekerja di sektor jasa (58,6%) juga lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki (45,4%), sehingga ketika sektor jasa ini turun, maka perempuan inilah yang paling pertama terdampak. Perempuan juga kurang memiliki akses ke perlindungan sosial dan akan menanggung beban yang kurang proporsional.

*Keempat*, pekerja informal yang tidak memiliki jaminan sosial dan asuransi. Termasuk dalam kelompok ini adalah wiraswasta dan pekerja lepas yang kemungkinan tidak memiliki akses ke mekanisme cuti berbayar atau sakit, dan kurang terlindungi oleh mekanisme jaminan sosial konvensional.

*Kelima*, buruh migran. Kelompok terakhir ini sangat rentan terhadap dampak krisis COVID-19 ini karena mereka kemungkinan tidak dapat lagi mengakses tempat kerja mereka di negara tujuan atau untuk kembali ke keluarga mereka di tanah airnya.

Penurunan produktivitas ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran ini tentu membutuhkan perhatian yang sangat serius dari negara-negara di seluruh dunia. Tuntutan perlindungan dan jaminan sosial meningkat tajam sekaligus mengalami koreksi besar-besaran, baik dalam hal sistem maupun mekanismenya.

Salah satu tuntutan yang paling besar adalah permintaan penerapan Jaminan Penghasilan Dasar Universal atau *Universal Basic Income* (UBI) sebagai salah satu solusi jangka pendek (darurat) maupun jangka panjang (permanen) untuk persoalan pandemi dan resesi ekonomi global yang sudah di depan mata ini.

## Bantuan Tunai Lebih Efektif Mengatasi Krisis

Memberikan uang tunai dalam situasi bencana atau krisis kemanusiaan ternyata lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan memberikan bantuan dalam bentuk non-tunai. *The Power of Financial Aid*, sebuah situs yang didedikasikan untuk mengumpulkan fakta dan data tentang bantuan tunai ini merangkum berbagai alasan dan temuan lapangan yang memperkuat argumentasi ini. Tentu saja, bantuan tunai tidaklah selalu menjadi solusi terbaik, namun dampaknya pada korban bencana tersebut terbukti jauh lebih besar dibanding bantuan non-tunai. Berikut ini adalah beberapa alasan dan temuan di lapangan tersebut:

**Keluarga dapat membeli apa yang menjadi kebutuhan mendesaknya dan meminimalisir uang yang terbuang sia-sia.**

Setiap individu dan keluarga memiliki prioritas kebutuhan yang berbeda, baik di masa normal maupun di tengah bencana. Maka tidak heran jika bantuan tunai akan merefleksikan pemenuhan skala prioritas ini secara lebih baik dibandingkan dengan bantuan non-tunai. Sebaliknya, banyak bantuan non-tunai, semisal bahan pangan, yang seringkali kurang tepat sasaran. Sekitar 95% dari dana kemanusiaan dihabiskan untuk makanan dan barang-barang lainnya. Terkadang, bentuk bantuan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan korban, tapi juga seringkali meleset. Sebuah survey yang dilakukan di lima negara di Timur Tengah (World Humanitarian Council, 2015) tentang seberapa sesuai dan tepat bantuan non-tunai ini mengungkapkan bahwa dengan skala maksimum 10, rata-rata penerima bantuan menjawab di skala 3. Artinya, bantuan non-tunai yang diberikan tersebut sangat jauh dari harapan dan kebutuhan si penerima.

Barang-barang bantuan yang tidak diinginkan tersebut pada akhirnya akan dijual kembali (lebih dari 50%). Bahkan dijual dengan harga sangat murah untuk kemudian hasilnya mereka belanjakan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya. Tentu saja hal ini mengurangi dampak positif dari bantuan tadi, baik secara nilai maupun ketepatangunaannya. Lebih jauh, sebuah studi di Lebanon juga menunjukkan sekitar 80% penerima bantuan kemanusiaan lebih memilih uang tunai dibanding jenis bantuan lainnya. Hanya 5% saja yang menginginkan bantuan barang dan 15% yang meminta kombinasi keduanya.

Bukan hanya penerima bantuan yang lebih suka bentuk tunai, namun para ekonom – seperti Amartya Sen - juga cenderung mendukung bantuan tunai ini karena dianggap akan mampu meningkatkan kadar kesejahteraan si penerima dibanding dengan pemberian non-tunai dengan nilai yang sama. Dampak bantuan tunai ini akan berlipat-lipat manakala penerima bantuan juga mampu membelanjakannya dengan tepat. Dan berbagai kajian, termasuk eksperimen UBI, telah membuktikan kecenderungan ini. Di mana asupan nutrisi, kesehatan, akses pada pendidikan, dan insentif pada tenaga kerja akan ikut meningkat melalui bantuan tunai tersebut.



**Komunitas lokal akan menjadi lebih tercukupi secara ekonomi (*self-sufficient*) dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan dari luar.**

Layaknya mendapat suntikan "darah segar", distribusi uang ke dalam perekonomian akan mampu menghasilkan "efek ekonomi berganda" yang ujungnya akan membantu memperkuat dunia usaha, meningkatkan konsumsi, dan menciptakan lapangan kerja baru yang menguntungkan bagi seluruh anggota masyarakat. Banyak studi mencatat bahwa *multipliers of financial aid* biasanya antara 1.5 hingga 2.5. Artinya, setiap uang tunai masuk sebesar 1 Triliun rupiah, misalnya, akan mampu menciptakan pendapatan 1,5 – 2.5 Triliun.

Studi kasus di Meksiko menunjukkan bahwa konsumsi barang-barang meningkat hingga 12% dari program bantuan tunai pemerintah. Uang tersebut tidak hanya habis dikonsumsi, namun juga akan diinvestasikan ke dalam aset produktif lainnya seperti binatang ternak atau tanah. Investasi ini akan mampu meningkatkan konsumsi hingga 24% bahkan setelah program bantuan tunai itu berakhir. Sebagian pihak mungkin mengkhawatirkan adanya inflasi sebagai dampak bantuan tunai skala besar. Namun demikian, studi Bank Dunia terhadap 30 program bantuan finansial ini menunjukkan bahwa tidak terjadi inflasi yang signifikan. Sebaliknya, masuknya bantuan dalam bentuk baranglah yang justru akan berdampak langsung pada pasar lokal.

**Pemerintah lokal dapat mengumpulkan pajak lebih banyak sehingga mampu menyalurkan dana untuk mengatasi krisis di masa depan dengan lebih baik**

Transfer tunai biasanya diberikan kepada rumah tangga melalui rekening Bank, transfer elektronik, atau saluran formal lainnya yang mudah dilacak oleh pemerintah setempat. Artinya, bantuan finansial dapat secara langsung mendorong warga negara untuk masuk dalam sistem finansial formal tersebut, sehingga memudahkan pemerintah dalam mengumpulkan pajak. Meskipun bantuan uang tunai itu sendiri bebas pajak, namun aktivitas lanjutannya memiliki kemungkinan untuk diambil pajaknya oleh pemerintah.

Ada sekitar 2 milyar orang di negara berkembang yang belum terjangkau sistem keuangan formal ini. Wajar jika kemudian negara berkembang biasanya hanya mampu mengumpulkan 12% GDP nya dari pajak, dibandingkan dengan negara anggota OECD yang rata-rata mampu mengumpulkan pajak hingga 33%. Dengan kata lain, transfer tunai dari negara kepada warga negara atau rumah tangga akan mampu menjadi pendorong perekonomian secara menyeluruh.

**Pembayar pajak di luar negeri dan lembaga donor lainnya akan mampu menyimpan anggaran lebih besar karena efisiensi yang dihasilkan dari program transfer tunai**

Selain lebih disukai, lebih tepat sasaran, dan mampu menggerakkan roda perekonomian, bantuan tunai juga jauh lebih efisien dibanding bantuan barang. Pendeknya jalur distribusi dan birokrasi membuat transfer tunai juga meminimalisir potensi korupsi. Di Ethiopia, *World Food Program* menemukan bahwa transfer tunai lebih hemat 25% - 30% dibanding dengan bentuk bantuan lainnya. Di negara-negara lainnya, penghematan bisa mencapai 13% sampai 23%. Penggunaan teknologi telepon genggam, misalnya, adalah pendorong utama penghematan ini. Selain itu, penggunaan teknologi biometrik sebagai metode klaim bantuan juga telah memangkas banyak biaya administrasi dan modus-modus pencurian bantuan sosial lainnya.

**Dukungan untuk program-program transfer tunai di seluruh dunia juga semakin meluas**

Lebih dari 200 juta orang di planet bumi ini yang rutin terdampak berbagai bencana alam, perang, dan krisis kemanusiaan lainnya. Belum termasuk mereka yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Sayangnya, hanya sekitar 6% dari total 25 Triliun USD bantuan kemanusiaan ini yang berbentuk transfer tunai. Tentu banyak ahli yang sepakat dan terus mendorong agar persentase bantuan tunai ini bisa terus ditingkatkan. Seharusnya proporsi bantuan tunai ini bisa tujuh kali lebih besar dari yang ada sekarang atau sekitar 10 Milyar USD (37% - 42%). Alasan utamanya adalah bantuan tunai ini dinilai cocok untuk segala bentuk bencana, apalagi jika ada kombinasi dengan bantuan non-tunai lainnya sebagai pendamping atau pelengkap.

# Proposal *Helicopter Money* (HM) di Uni Eropa

*Helicopter Money* (HM) ini adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah uang baru yang dicetak dan didistribusikan kepada masyarakat untuk merangsang ekonomi selama resesi atau ketika suku bunga turun ke nol.

Istilah *Helicopter Money* (HM) dikenalkan oleh ekonom abad ke-20, Milton Friedman. HM merupakan kebijakan moneter yang tidak konvensional, dimana bank sentral mencetak uang tambahan dan mendistribusikannya langsung kepada warga negara. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengeluaran konsumen sebagai upaya pemulihan ekonomi selama resesi. Di Eropa, wacana dan perdebatan tentang perlu tidaknya kebijakan ini juga cukup hangat.

Seperti kita tahu, *The European Central Bank* (ECB) telah mengambil langkah-langkah beragam untuk mengurangi dampak krisis COVID-19 ini, termasuk berjanji untuk membeli 750 miliar Euro (\$ 815 miliar) dalam bentuk obligasi pemerintah di tahun 2020 ini. Namun, data yang dirilis menunjukkan bahwa kebijakan ECB ini hanya akan kuat sampai bulan Oktober 2020 jika ECB terus membeli obligasi negara anggota dengan kecepatan seperti saat ini.

Para ahli khawatir bahwa HM ini akan mempengaruhi independensi bank sentral, investasi asing (karena akan mendevalusi mata uang), dan ketidakjelasan tentang bagaimana orang akan menggunakan uang tunai tambahan tersebut? Di sisi lain, jika ECB terus membeli obligasi negara dalam beberapa bulan ke depan dan hasilnya masih tetap kecil, maka pilihan yang tersedia adalah mencoba HM ini.

Di Uni Eropa sendiri, secara umum ada dua langkah utama yang sudah dilakukan untuk merespon dampak COVID-19 ini. Pertama adalah langkah jangka pendek dan kedua berupa langkah-langkah jangka menengah. Dalam strategi jangka pendek, negara-negara di Uni Eropa berusaha menahan dampak ekonomi COVID-19 dengan cara memberikan bantuan pada rumah tangga dan bisnis. Pemerintah menawarkan berbagai macam subsidi dalam bentuk keringanan pajak, penangguhan pembayaran utang dan pajak, skema pengangguhan parsial, dan kebijakan dukungan pendapatan bagi pekerja dan orang-orang yang secara langsung terkena dampak COVID-19 ini.

Pada tingkatan makro, strategi ini akan didukung oleh dua langkah utama. Pertama, para kepala negara dan menteri-menteri keuangan di Uni Eropa telah menyetujui untuk mengaktifkan "*General Escape Clause*" dari Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan (SGP). Hal ini berarti pemerintah dapat memompa uang ke dalam ekonomi sebanyak yang mereka butuhkan. Kedua, ECB telah mengumumkan program *quantitative easing* sementara yang baru sebesar € 750 bn. *The Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP) juga akan berlangsung hingga akhir tahun 2020. Berkat PEPP ini, maka ECB akan memiliki banyak kelonggaran untuk melakukan intervensi di pasar obligasi untuk mengendalikan imbal hasil obligasi negara. Dengan cara ini, ECB secara tepat telah mencegah krisis utang di Eropa.

Namun demikian, sangat penting untuk memahami bahwa kombinasi aturan fiskal dan *Quantitative Easing* (QE)<sup>10</sup> tambahan ini bukan merupakan stimulus dari sisi permintaan. Strategi ini prioritasnya bukan untuk ekspansi pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi, tetapi hanya untuk memastikan bahwa perusahaan dan bisnis tidak tutup serta rumah tangga yang rentan tidak semakin terpuruk.

Dalam strategi jangka menengah, pembuat kebijakan perlu memberikan paket stimulus besar untuk memastikan ekonomi kembali pulih. Sejauh ini, respon Uni Eropa masih berkisar pada dorongan agar setiap negara anggota membelanjakan lebih banyak anggaran nasional mereka. Tetapi sulit dipastikan bahwa negara-negara anggota akan menggunakan kelonggaran ruang fiskal yang telah diberikan kepada mereka itu secara memadai.

Pertama, karena aktivasi "*General Escape Clause*" dari Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan (SGP) itu dimaksudkan hanya untuk sementara. Oleh karena itu, pemerintah negara anggota mungkin berhati-hati dan waspada karena takut meningkatkan utang publik di masa depan. Kedua, mengingat sejarah manajemen krisis di Eropa, ada kekhawatiran bahwa setelah krisis pandemi, UE akan memaksa semua negara anggota untuk mengurangi utang mereka dengan pajak masa depan dan langkah-langkah penghematan yang salah arah.

Inilah sebabnya mengapa pembicaraan tentang *Eurobonds* atau "*Corona Bonds*" sangat relevan. Dengan menyetujui instrumen fiskal bersama, dan khususnya dengan menerbitkan bersama utang dalam skala besar, UE dapat memberikan stimulus yang lebih kuat dalam jangka menengah. Tetapi proses politik untuk mengeluarkan *Eurobonds* bisa sangat lama dan sulit untuk diselesaikan secara tepat waktu.

Terlepas dari tantangan dan konsekuensinya, beberapa negara justru telah mengadopsi gagasan Friedman ini. Hong Kong memutuskan pada bulan Februari<sup>11</sup> lalu untuk memberikan bantuan tunai kepada penduduk tetapnya sekitar \$ 1.200. Ini dimaksudkan untuk mendukung ekonomi setelah pandemi, serta setelah banyak protes yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Makau dan Singapura, dan Amerika Serikat, juga telah mengumumkan skema serupa.

### Usulan dari *Positive Money*

Dibandingkan dengan kebijakan fiskal konvensional lainnya, HM dianggap sebagai pilihan yang sangat menarik karena dapat dengan cepat diputuskan dan diimplementasikan. Keputusan ini tergantung sepenuhnya pada ECB untuk memutuskan jumlah pasti uang yang harus dicetak dan disuntikkan ke dalam perekonomian. *Positive Money*<sup>12</sup> - sebuah lembaga *Think Thank* dan riset non-profit yang berbasis di Brussels - mengusulkan agar ECB membayarkan satu kali transfer (bantuan tunai) sebesar EUR 1000 kepada semua warga di Zona Euro, dengan total 341 miliar Euro dan setara hampir 3% dari PDB total zona euro.

Usulan mereka, pembayaran harus dilakukan per kapita. Demi kesederhanaan dan kecepatan, transfer harus dilakukan secara universal untuk semua warga negara, tanpa syarat atau pengujian. Kalau pun harus menggunakan target tertentu, mereka menganjurkan sebisa mungkin daftar penerima manfaat harus tetap sangat luas (mewakili setidaknya 80% dari total

<sup>10</sup> Pelonggaran kuantitatif adalah kebijakan moneter non-konvensional yang dipakai Bank Sentral untuk mencegah penurunan suplai uang ketika kebijakan moneter standar mulai tidak efektif

<sup>11</sup> <https://www.cnn.com/2020/04/23/could-europe-opt-for-helicopter-money-to-deal-with-coronavirus.html>

<sup>12</sup> <https://positivemoney.org/>

populasi), dan bahwa kriteria pemilihan harus hanya didasarkan pada cara yang paling sederhana yaitu dengan mengecualikan orang-orang paling kaya.

Prinsip-prinsip itu akan memastikan bahwa pendistribusian bantuan tunai ini tidak tertunda atau tesendat oleh panjangnya birokrasi, dan bahwa skema tersebut menguntungkan sebagian besar masyarakat dan tidak malah menimbulkan kecemburuan. *Positive Money* mengusulkan pembayaran harus dilakukan setelah puncak krisis kesehatan masyarakat mampu dilewati. Tetapi rencana ini harus diumumkan sebelumnya sesegera mungkin oleh ECB, untuk menciptakan sinyal positif dan efek kepercayaan publik dan pasar.

Keuntungan nyata dari uang helikopter ini adalah dapat secara langsung menempatkan uang kepada setiap orang yang membutuhkan sehingga mereka dapat langsung membelanjakannya kembali ke dalam perekonomian. Seperti dituangkan dalam kajian Claudia Sahm<sup>13</sup> dan Stanley Fischer<sup>14</sup>, HM bisa bertindak sebagai stabilisator ekonomi yang cukup kuat. Meskipun efek pasti dari kebijakan ini sulit diperkirakan, namun efek minimalnya dapat diprediksi berdasarkan kecenderungan marginal rata-rata terhadap *marginal propensity to consume* (MPC), yang setidaknya 40% di zona euro.

Berdasarkan asumsi ini, uang helikopter sebesar 1.000 Euro untuk semua warga di 78 zona euro diprediksi akan mampu meningkatkan perekonomian hingga 1,2%. Tetapi angka ini harus dilihat sebagai batas bawah karena tiga alasan. Pertama, MPC kemungkinan akan jauh lebih tinggi karena orang-orang baru saja dilepaskan dari masa karantina yang panjang. Kedua, angka ini tidak memperhitungkan efek pengganda fiskal apa pun, yang harus menjadi subjek lebih lanjut untuk dianalisis. Ketiga, efektivitas transfer dapat lebih ditingkatkan dengan mempertimbangkan kriteria uji coba, seperti mengecualikan kelompok terkaya dalam populasi.

Catatan terpenting dari kebijakan HM ini adalah kebijakan ini tidak boleh menggantikan kebijakan jaminan sosial yang sudah ada. Sebaliknya, HM akan berkontribusi untuk mengisi kesenjangan dari program jaminan sosial dan bantuan sosial yang ada. Oleh karena itu, HM dan kebijakan fiskal lainnya ini tidak boleh berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus diimplementasikan sebagai bagian dari skenario paket stimulus yang lebih besar sebagai bagian dari langkah-langkah penguatan. Jika HM fokus untuk merangsang agregat permintaan, maka diperlukan kebijakan lain untuk merangsang investasi dari sisi penawaran.

Selain itu, program stimulus ekonomi apa pun harus juga memiliki skenario mitigasi perubahan iklim dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan di dalamnya. Kita harus membangun keseimbangan antara pemulihan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan semangat ini, kebijakan HM di masa depan juga perlu mempertimbangkan penetapan harga karbon (*carbon price*), untuk menghindari peningkatan karbon yang berlebihan akibat konsumsi barang dan jasa yang intensif.

### **Manfaat *Helicopter Money* (HM)**

Keuntungan pertama dari "*Helicopter Money*" adalah mendistribusikan uang langsung ke tangan setiap orang dimana uang itu sedang sangat dibutuhkan dan dengan mudah dapat segera dihabiskan. Namun demikian, momentum atau waktu adalah kunci utama kegagalan

<sup>13</sup> [https://www.hamiltonproject.org/assets/files/Sahm\\_web\\_20190506.pdf](https://www.hamiltonproject.org/assets/files/Sahm_web_20190506.pdf)

<sup>14</sup> [https://www.suerf.org/docx/f\\_77ae1a5da3b68dc65a9d1648242a29a7\\_8209\\_suerf.pdf](https://www.suerf.org/docx/f_77ae1a5da3b68dc65a9d1648242a29a7_8209_suerf.pdf)

atau keberhasilan kebijakan semacam ini. Memilih saat yang tepat untuk bertindak adalah yang terpenting untuk mendapatkan dampak terbaik dari kebijakan ini.

Mentransfer uang tunai kepada warga negara melalui skema HM di tengah pandemi ini tentu juga akan mengirimkan pesan yang bertentangan dengan prinsip pembatasan sosial (*social distancing*), karena orang-orang dalam waktu bersamaan diimbau untuk tidak keluar rumah (*stay at home*). Akibatnya tentu orang akan kesulitan untuk membelanjakannya. Meskipun di era sekarang konsumen punya pilihan untuk berbelanja *online*, tetapi kemudian kebijakan itu akan menguntungkan perusahaan-perusahaan teknologi besar saja dan kurang berpihak pada usaha kecil atau UMKM.

Mengingat hal di atas, beberapa pakar merekomendasikan pemerintah agar menunggu waktu yang paling tepat untuk mengaktifkan HM ini, yaitu setelah krisis kesehatan dan badai pandemi mulai terkendali. Dampak uang helikopter dapat lebih ditingkatkan dengan mengumumkan jumlahnya. Hal ini untuk menciptakan efek kepercayaan pada bisnis dan pasar. Sebagai contoh, jika Bank Sentral mengumumkan sebelumnya bahwa transfer tunai akan dilakukan pada titik tertentu di masa depan, ini akan mendorong bisnis untuk meningkatkan kapasitas produktif mereka (atau setidaknya tidak memberhentikan karyawan) untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi.

Meskipun sulit diprediksi secara tepat, suntikan uang helikopter ini akan meningkatkan PDB setidaknya 1,2% akibat dari peningkatan konsumsi<sup>15</sup>. Bahkan, kecenderungan orang untuk mengkonsumsi mungkin lebih tinggi setelah berbulan-bulan dalam masa karantina. Bahkan, Uang Helikopter diprediksi dapat mengurangi utang swasta, karena rumah tangga yang rentan dapat menggunakannya untuk melunasi utang, tagihan, sewa atau tunggakan hipotek mereka.

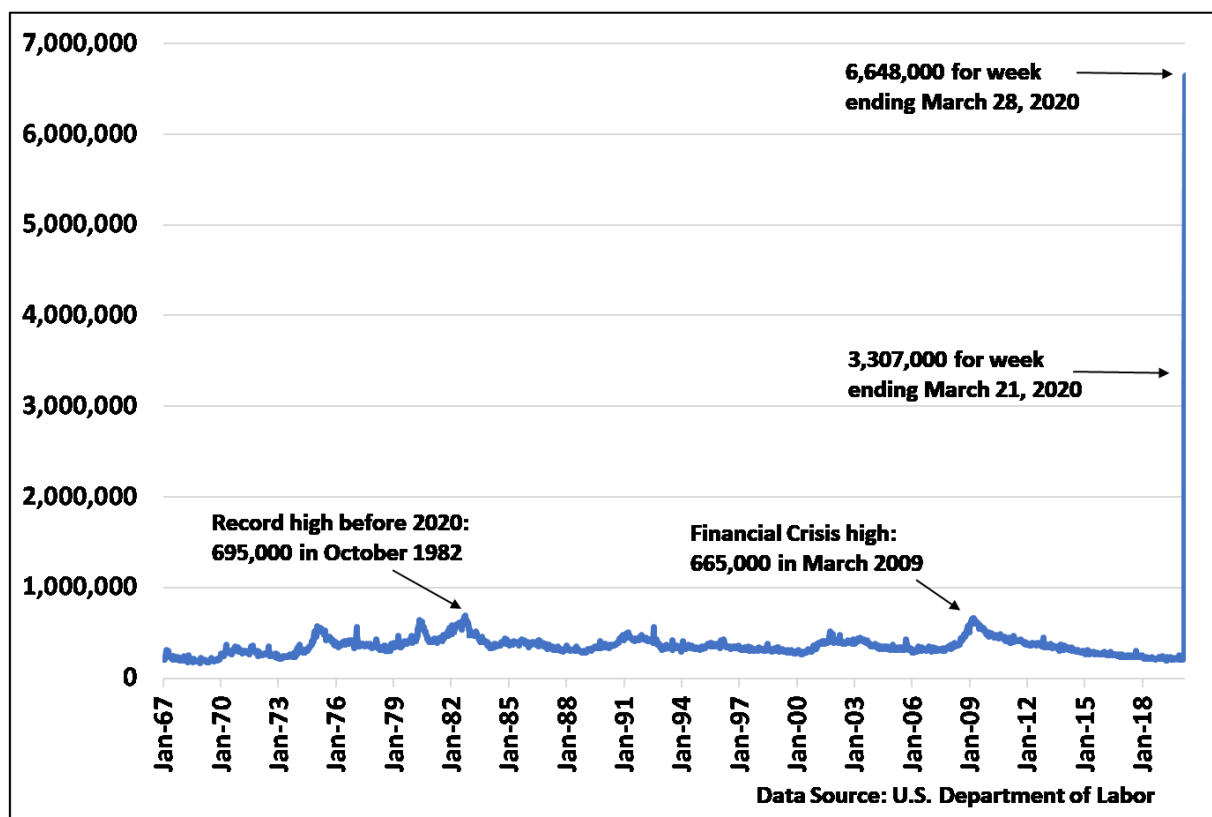
Bagi negara-negara yang rentan secara finansial, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan HM ini akan meningkatkan utang negaranya menjadi sangat besar. Gagasan ini juga biasanya akan ditentang oleh para ekonom ortodoks. Intervensi cepat Bank Sentral untuk meredam goncangan di pasar akibat spekulasi COVID-19 adalah langkah jangka pendek yang penting dan tepat. Namun itu saja tidak cukup. Pemerintah perlu mulai mengambil pendekatan jangka menengah dan panjang lainnya, termasuk mempertimbangkan kebijakan HM (*helicopter money*) ini – tentu dengan disertai berbagai analisis dan perhitungan yang sangat matang.

---

<sup>15</sup> <https://www.positivemoney.eu/2020/03/helicopter-money-covid19-recession/>

## CARES Act di Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) termasuk negara yang memberlakukan pembatasan sosial skala besar atau *semi-lockdown* dalam menghadapi COVID-19. Meskipun banyak kritik akibat lambatnya pemerintah Federal merespon pandemi ini, namun akhirnya beberapa kebijakan penting yang cukup drastis dan ketat diambil oleh AS. Tiga minggu setelah penutupan seluruh negara bagian, dampak finansial dari puluhan ribu orang yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan ini pun semakin terlihat. Bahkan, tingkat pengangguran akibat pandemi di AS ini pun akhirnya memecahkan rekor terburuk sepanjang sejarah, yaitu mencapai 20.5 juta jiwa atau meningkat hingga 14.7%<sup>16</sup>



**Gambar 1.** Klaim Jaminan Sosial Pengangguran per minggu di AS. Jumlah pengangguran di AS mengalami peningkatan yang luar biasa semenjak pandemic COVID-19. Grafik di atas menunjukkan bahwa hampir sepuluh juta orang menganggur hanya dalam waktu dua minggu (sumber grafik: CSBS<sup>17</sup>)

Salah satu kebijakan yang penting dalam sejarah pandemi di AS tahun 2020 ini adalah diloloskannya *Coronavirus Aid, Relief, dan Economy Security Act* (CARES Act) atau dikenal dengan paket stimulus senilai \$ 2 triliun. Kebijakan ini diambil untuk mendistribusikan dana darurat

<sup>16</sup> <https://www.nbcnews.com/business/economy/u-s-economy-shed-record-20-5-million-jobs-last-n1202696>

<sup>17</sup> <https://www.csbs.org/covid-19-ravages-us-employment>

kepada mereka yang terdampak oleh krisis kesehatan dan ekonomi COVID-19. Penduduk dengan pendapatan kotor hingga \$ 75.000 (atau \$ 150.000 untuk pasangan yang sudah menikah) akan mendapatkan tunjangan sebesar \$ 1.200 (atau \$ 2.400 untuk pasangan). Bukan hanya itu, bagi mereka yang mendaftar untuk *unemployment benefit* (tunjangan pengangguran) akan berhak pula menerima tambahan \$ 600 per minggu selama 13 minggu<sup>18</sup>.

Mereka yang menerima Jaminan Sosial (baik pensiun atau disabilitas) tetapi tidak mengajukan pengembalian pajak pada tahun 2018 atau 2019, juga tetap berhak menerima cek stimulus ini. Warga AS tidak harus mendaftar untuk menerima cek stimulus ini. Proses pembayarannya otomatis melalui transfer ke rekening maupun cek (pos) langsung kepada warga AS yang memenuhi syarat tadi. Untuk individu yang menerima dana melalui transfer rekening, pembayaran telah mereka terima sejak tanggal 13 April 2020. Namun untuk orang Amerika yang menerima cek melalui pos, maka masa penantiannya akan jauh lebih lama (hingga lima bulan).

Meskipun stimulus bantuan ini cukup besar, namun hanya diberikan satu kali. Muncul berbagai usulan dan tekanan kepada pemerintah bahwa itu tidak cukup. Apalagi jika pembatasan sosial masih diberlakukan terus-menerus. Angka kematian di AS akibat COVID-19 ini memang masih yang paling tinggi di dunia. Efek pandemi terhadap kondisi ekonomi AS juga tak kalah mengkhawatirkan. Beberapa anggota Kongres AS pun menyadari bahwa banyak orang masih berjuang dan mungkin memerlukan bantuan keuangan tambahan. Setidaknya muncul dua proposal lanjutan yang kemudian beredar di Kongres AS:

1. *Emergency Money for the People Act* akan menyediakan cek stimulus bulanan sebesar \$ 2.000 hingga satu tahun
2. Rancangan Undang-undang Pembatalan Sewa dan Hipotek yang menginginkan pembatalan/penghapusan pembayaran sewa dan hipotek pemilik rumah hingga satu tahun penuh.

#### **Usulan Bantuan Tunai \$ 2.000 per bulan selama 12 bulan**

Rancangan Undang-Undang *Emergency Money for the People* diperkenalkan oleh politisi Partai Demokrat dari California, Ro Khanna, dan Ohio, Tim Ryan. Mereka berencana akan memberikan cek stimulus bulanan sebesar \$2.000 (\$4.000 untuk pasangan yang sudah menikah) selama 12 bulan. Tidak seperti CARES Act, semua warga negara yang berusia 16 tahun ke atas berhak menerima pembayaran penuh, asalkan mereka berpenghasilan kurang dari \$130.000 per tahun (\$ 260.000 untuk pasangan menikah). Proposal ini juga mengusulkan tambahan \$500 per anak (maksimal untuk tiga anak).

Penerima Stimulus Bulanan ini rencananya adalah:

- Orang Amerika berusia di atas 16 tahun dan berpenghasilan kurang dari \$130.000 per tahun.
- Pasangan suami istri yang berpenghasilan kurang dari \$ 260.000 akan menerima \$ 4.000 per bulan.

<sup>18</sup> <https://www.forbes.com/sites/ryanguina/2020/04/21/second-stimulus-payment-proposals/#3727adac15d8>



- Keluarga yang memenuhi syarat akan menerima tambahan \$ 500 per anak (maksimal untuk tiga anak).
- Mereka yang menganggur atau tidak memiliki penghasilan juga dipertimbangkan untuk menerima pembayaran ini, termasuk bagi mereka yang baru-baru ini menganggur akibat dari pandemi.
- Jika berhasil lolos, maka pembayaran akan dilakukan melalui setoran langsung, cek, kartu debit pra-bayar, atau platform digital lainnya seperti Venmo, Zelle, atau PayPal.

### **Usulan RUU Penghapusan Pembayaran Sewa atau Hipotek hingga Satu Tahun**

Selain dukungan yang luas untuk menyediakan *Basic Income*, Rancangan Undang-undang Pembatalan Sewa dan Hipotek juga diperkenalkan oleh para politis dan anggota parlemen AS lainnya, Ilhan Omar (D-MN). Ia mengusulkan akan membatalkan pembayaran sewa atau hipotek untuk tempat tinggal hingga satu tahun.

RUU ini akan mencakup:

- Pembayaran sewa penuh atau pengampunan pembayaran hipotek untuk tempat tinggal utama selama satu tahun.
- Tidak ada akumulasi utang untuk penyewa atau pemilik rumah
- Tidak ada tanda negatif di riwayat kredit pemilik rumah

RUU ini juga mencakup Rental Property Relief Fund dan the Home Lenders Relief Fund. Keduanya dikelola oleh Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan AS. Dana ini akan membayar tuan tanah dan pemegang hipotek untuk menutupi kerugian yang terkait dengan penyewa dan pemilik rumah yang tidak membayar sewa atau pembayaran hipotek mereka. Pemilik properti/tanah dan pemberi pinjaman akan diminta untuk mengikuti pedoman pemerintah Federal untuk praktik peminjaman dan penyewaan yang adil selama lima tahun agar memenuhi syarat untuk menerima dana melalui Rancangan Undang-Undang Pembatalan Sewa dan Hipotek.

### **Solidaritas Masyarakat Sipil Untuk Penerapan Basic Income**

Program Emergency *Basic Income* tidak hanya dimotori oleh politisi dan pemerintah AS, namun juga digalang oleh para tokoh, seniman, dan yayasan sosial lainnya. Salah satunya adalah sebuah program penggalangan bernama Project100. Melalui program penggalangan dana selama seratus hari ini, sekitar 100.000 keluarga ditargetkan akan menerima uang tunai masing-masing sebesar 1.000 USD<sup>19</sup>.

Sasaran utamanya adalah keluarga berpendapatan rendah penerima Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), sebuah program subsidi pemerintah AS untuk membantu keluarga berpendapatan rendah memperoleh makanan sehat dan bergizi. Penerima Project100 dipilih acak sesuai data penerima SNAP yang dimiliki pemerintah.

<sup>19</sup> <http://indobig.net/para-tokoh-dan-artis-as-luncurkan-project100/>

Inisiator Project100 ini adalah para tokoh dan artis seperti Andrew Yang (mantan kandidat capres partai Demokrat pengusung UBI), Ariana Grande, Julia Louis-Dreyfus, Halsey, Chris Meloni, dan beberapa pemain NFL. Penggalangan dana dan penyalurannya dikelola oleh GiveDirectly dan Propel (perusahaan perangkat lunak pencipta aplikasi Fresh EBT).

Beberapa lembaga donor lainnya juga menyokong proyek100 ini, seperti Yayasan Keluarga Schusterman, Blue Meridian, Google.org, Rihanna's Clara Lionel Foundation, Blue Haven Initiative, The Late Show with Stephen Colbert, dan lain-lain. Project100 ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan dampak COVID-19 terhadap orang miskin di Amerika Serikat. Bukan hanya mereka yang miskin, kondisi krisis keuangan rumah tangga kini benar-benar dialami oleh sebagian besar rumah tangga di AS.

Dalam buku *The Financial Diaries* yang ditulis oleh Morduch & Schneider (2018), sekitar tujuh puluh delapan persen orang Amerika mengatakan mereka hidup dengan mengandalkan gaji mingguan atau dikenal dengan istilah *paycheck-to-paycheck*. Bahkan, lebih dari setengahnya tidak mampu membayar jika tiba-tiba mendapat tagihan darurat lebih dari 400 USD.

AS juga telah mencatat rekor tertinggi dalam masalah kesehatan mental, depresi, kecemasan, penyalahgunaan obat-obatan, overdosis obat terlarang, dan angka bunuh diri. Tentu ini masalah yang tidak sederhana untuk dipecahkan, sekalipun untuk negara maju seperti Amerika Serikat. Jaminan Penghasilan Dasar Darurat seperti Project100 ini adalah sedikit upaya diluar pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak agar tetap mampu membeli makanan, membayar sewa rumah, dan memberikan harapan bawah mereka belumlah benar-benar kehilangan masa depan.

### **HudsonUP Project**

Disamping Project100, *The Spark of Hudson dan Humanity Forward* juga mengumumkan tahap awal program percontohan pendapatan dasar universal (UBI) yang akan diluncurkan di Hudson, N.Y. akhir tahun ini. Percobaan ini akan memberikan uang sebesar 500 USD per bulan kepada 20 penduduk Hudson selama lima tahun. Total anggaran percobaan ini sebesar \$ 600.000 yang bersumber dari The Spark of Hudson dan Humanity Forward. Hudson sendiri merupakan sebuah kota dengan populasi sekitar 6.000 penduduk. Pendapatan rata-rata rumah tangga adalah \$ 35.439 dan tingkat kemiskinan mencapai 19,2%. Kondisi umum ini menjadikan Hudson kota yang ideal untuk program percontohan UBI.

Selain dukungan dari pemerintah kota setempat, proyek percobaan ini juga telah mengumpulkan dukungan luas dari para pemimpin dan organisasi masyarakat lainnya. Mereka menyambut proyek percobaan ini dan berharap dapat menolong penerima program untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Andrew Yang, mantan kandidat presiden dan pendiri Humanity Forward, percaya bahwa proyek HudsonUP akan meningkatkan kesehatan mental penerima dan memberdayakan mereka untuk merasa lebih aman di masa depan mereka. Melalui UBI, diharapkan orang akan mulai membuat rencana jangka panjang yang lebih bermakna. Tidak lagi hanya terkungkung memikirkan tagihan bulan depan atau kebutuhan mendesak jangka pendek lainnya.

Pendiri The Spark of Hudson, Susan Danziger dan Albert Wenger, adalah pendukung lama UBI. Mereka berharap program yang dirancang selama lima tahun ini akan

menunjukkan dampak jangka panjang yang dapat dirasakan oleh komunitas. Menurut Danziger, UBI akan memberikan kebebasan pada seseorang untuk menjadi wirausaha, mencalonkan diri dalam pemilu, tinggal di rumah bersama anak-anak, merawat orang tua yang sakit, meninggalkan hubungan atau pekerjaan yang kasar, dan membantu komunitas di saat krisis.

The Spark of Hudson sendiri adalah pusat belajar dan pelatihan yang didedikasikan untuk pengembangan dunia pendidikan. Sedangkan Humanity Forward adalah organisasi yang didirikan oleh mantan kandidat presiden Andrew Yang. Organisasi ini didedikasikan untuk melanjutkan gerakan dan kampanye kepresidenan Yang tahun 2020 serta untuk mewujudkan ide-ide intinya, salah satunya termasuk UBI ini.

Andrew Yang dan kawan-kawan selebritis ini tahu bahwa menyerahkan uang langsung ke tangan orang yang memerlukan adalah cara termudah dan tercepat untuk membuat orang mampu melewati krisis ini. *“Bukan hanya untuk masa krisis, bahkan di saat normal kita memerlukan program semacam ini”* ungkapnya dalam wawancara dengan Forbes. Project100 ini sungguh bisa menjadi inisiatif yang bisa ditiru di tempat lain. Seperti halnya berbagai penggalangan dana oleh artis dan para tokoh lainnya, akan sangat baik apabila dikoordinasikan dan disalurkan menjadi program Jaminan dalam bentuk tunai dan langsung seperti Project100 ini.

Di tanah air, kita juga telah melakukan berbagai penggalangan dana swadaya masyarakat semacam ini, baik melalui platform kitabisa.com maupun yayasan kemanusiaan lainnya. Akan tetapi, penyalurannya masih didominasi dalam bentuk makanan atau sembako. Kita memerlukan model bantuan tunai yang lebih banyak, sehingga memberikan keleluasaan bagi penerima untuk menggunakan dana bantuan itu sesuai kebutuhannya yang paling mendesak.

Saat ini, kita berada di tengah-tengah krisis pandemi yang menewaskan ratusan ribu orang dan menghilangkan jutaan pekerjaan di dunia. Siapa pun yang memiliki kapasitas untuk membantu, harus memberikan apa yang mereka bisa dengan semaksimal mungkin. Lebih dari itu, bantuan yang sudah terkumpul, juga harus mampu sampai ke tangan yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.

## *Renda Basica Emergencial* di Brasil

Puluhan juta warga Brasil juga telah menerima pembayaran pendapatan dasar darurat untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi COVID-19<sup>20</sup>. Pembayaran ini merupakan hasil desakan masyarakat sipil kepada Kongres dan pemerintah yang telah dimulai sejak akhir Maret 2020 lalu. Salah satu tagar yang menjadi trending di media sosial selama masa kampanye itu adalah *#PagaLogoBolsonaro* (artinya: segera bayar Bolsonaro!)

Seperti krisis lainnya, pandemi COVID-19 membantu membuat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi menjadi lebih kentara di seluruh dunia. Data terakhir (5 Mei 2020), Brasil mencatat sebanyak 110.156 kasus dan 7.485 kematian (seperti halnya Indonesia, angka aktualnya kemungkinan lebih tinggi dari itu). Kelompok masyarakat bawah dan paling rentan tentu saja adalah yang paling merasakan dampak buruk pandemi ini. Ditambah, sumber daya yang mereka miliki untuk sekedar bertahan hidup dan melindungi diri sangatlah terbatas.

Menyikapi situasi tersebut, sebuah koalisi yang terdiri lebih dari 160 organisasi dan gerakan masyarakat sipil Brasil, mencoba bergerak dengan kampanye pentingnya *Basic Income* dengan nama *A Renda Básica Emergencial* (Jaminan Penghasilan Dasar Darurat). Diluncurkan pada tanggal 20 Maret 2020, kampanye ini dengan cepat membangun dukungan lebih dari 500.000 warga dan 3.000 influencer media sosial. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari lima organisasi utama: *Rede Brasileira de Renda Básica* (Jaringan Penghasilan Dasar Brasil), *Coalizão Negra por Direitos* (Koalisi Hitam untuk Hak), *Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social* (Institut Etos untuk Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial), Nossas, dan INESC – *Instituto de Estudos Socioeconômicos* (Institut Studi Sosial Ekonomi).

Kampanye ini menyajikan proposal kebijakan yang rinci kepada beberapa anggota Kongres Nasional Brasil, yang kemudian dimasukkan ke dalam agenda pembahasan di sidang legislatif. RUU ini disetujui dengan suara bulat oleh Deputi dan senator Federal pada tanggal 30 Maret 2020. Tiga hari kemudian, RUU ini pun disetujui oleh Presiden Jair Bolsonaro.

Tanggal 9 April 2020, permintaan para aktivis dan warga sipil itu pun akhirnya menjadi kenyataan. Pembayaran pertama sebesar R\$ 600 (lebih dari rata-rata setengah upah bulanan minimum Brasil) dikirim kepada 59 juta warga berpendapatan rendah di Brasil. Secara tidak langsung, lebih dari separuh populasi negara itu diperkirakan akan turut merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Pembayaran penghasilan dasar darurat ini akan berlanjut setidaknya selama tiga bulan.

Kampanye dan tekanan masyarakat sipil kepada pemerintah Brasil ini nampak sangat efektif dalam melahirkan UU Jaminan Penghasilan Dasar Darurat. Krisis akibat pandemi COVID-19 secara langsung telah membantu mempercepat terlaksananya sebuah kebijakan yang sangat sulit diwujudkan pada masa normal. Dengan disahkannya undang-undang baru ini, maka jalan untuk hak penghasilan dasar bagi setiap warga negara di Brasil semakin terbuka. Penghasilan Dasar Darurat ini kelak diharapkan menjadi kebijakan yang lebih permanen setelah pandemi COVID-19 mereda. Ada juga harapan bahwa jaminan penghasilan ini akan

---

<sup>20</sup> <https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/covid-19-brazil-implements-basic-income-policy-following-massive-civil-society-campaign/>

menjadi lebih universal, tidak hanya terbatas pada mereka yang memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan dalam undang-undang saat ini.

Bahkan, *Partido Socialismo e Liberdade* (PSOL) – Partai sayap kiri Brasil – sudah lantang menyerukan agar pembayaran Jaminan Penghasilan Dasar Darurat ini diperpanjang hingga Desember 2020. Selain itu, PSOL juga mengkritik keras pemerintah Bolsonaro yang dianggap sengaja memperlambat dan menunda pembayaran jaminan penghasilan dasar ini. Mereka khawatir lambannya birokrasi pemerintah ini akan memperburuk krisis di lapangan. Masih banyak masyarakat yang mengeluh mengenai lambatnya respon pemerintah dan panjangnya antrian untuk mendapatkan pembayaran renda ini.

### **Pelajaran Penting**

Pencapaian luar biasa di Brasil ini adalah pengingat bahwa krisis dapat membuka ruang politik bagi masyarakat sipil untuk mendorong perubahan kebijakan yang biasanya sulit atau hampir mustahil untuk dicapai pada situasi normal. Ketika perhatian publik beralih pada kebutuhan yang sangat mendesak dan darurat, politisi menjadi lebih sensitif terhadap seruan untuk mengambil kebijakan atau terobosan yang lebih berani. Undang-undang penghasilan dasar darurat di Brasil ini adalah bukti kekuatan rakyat sipil efektif dalam mendorong kebijakan untuk mengurangi ketimpangan.

Meskipun penguasa Brasil saat ini, seperti halnya Amerika Serikat, merupakan pemerintahan administrasi sayap kanan (konservatif), bukanlah penghalang yang membuat kebijakan progresif ini menjadi mustahil. Pengalaman Brasil ini menjadi sebuah contoh kasus yang menarik tentang bagaimana masyarakat sipil dapat menemukan peluang untuk melakukan konsolidasi agenda yang progresif selama krisis COVID-19. Tidak hanya menuntut jaminan pendapatan dasar, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mendorong kebijakan kunci lainnya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial yang lebih baik.

## Bantuan Tunai di Hong Kong

Kebijakan bantuan tunai juga ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong dalam menangani dampak COVID-19. Pemerintah Hong Kong termasuk negara yang paling awal mengadopsi paket bantuan tunai ini meski hanya satu kali pembayaran. Hong Kong telah memberikan pembayaran sebesar HK \$ 10.000 (\$ 1.284) untuk setiap penduduk tetap yang berusia 18 tahun ke atas. Selain bantuan tunai di atas, berikut ini adalah beberapa rincian kebijakan lain yang diambil pemerintah Hong Kong untuk penanganan COVID-19<sup>21</sup> :

(a) Langkah-langkah bantuan untuk membantu dunia usaha, termasuk pinjaman berbunga rendah dengan jaminan 100% disediakan oleh pemerintah, dengan batas maksimum HK \$ 2 juta, dan pengurangan pajak laba sebesar 100% untuk HK \$ 20.000 pertama.

(b) Melonggarkan biaya perijinan usaha, memperluas subsidi untuk listrik dan air dan tagihan pengelolaan air limbah.

(c) Disiapkan anggaran sebesar HK \$ 700 juta untuk mempromosikan pariwisata begitu pandemi coronavirus berlalu.

(d) Untuk warga negara, langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengurangan pajak gaji 100% untuk HK \$20.000 pertama, menghapuskan tarif pada properti HK \$ 1.500 per kuartal, dan satu bulan sewa untuk penyewa berpenghasilan rendah.

(e) Total anggaran sebesar HK \$ 75 miliar diberikan kepada Otoritas Rumah Sakit pada tahun 2020-2021.

Defisit keuangan di negara ini diperkirakan akan mencapai rekor sebesar HK \$ 139,1 miliar di tahun fiskal mendatang. Namun demikian, mereka juga optimis, jika manfaat dari pemberian uang tunai dan potongan pajak didistribusikan tahun ini serta semua orang membelanjakannya tahun ini juga, maka dorongan ekonomi bisa mencapai 0,5% hingga 1% dari PDB.

<sup>21</sup> <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/hong-kong-residents-cash-handout-coronavirus-unrest/>

## Bantuan Tunai di Jepang

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, resmi memperluas keadaan darurat virus corona di luar Tokyo, Osaka dan lima prefektur lainnya menjadi ke seluruh negara (16/04/20). Perluasan kondisi darurat ini sebagai lanjutan untuk mencegah penyebaran virus corona yang berpotensi melumpuhkan sistem perawatan kesehatan di negeri Samurai ini. Darurat kesehatan ini kini mencakup 47 prefektur di negara berpenduduk sekitar 126 juta orang jiwa itu. Abe mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan tunai 100.000 yen (\$ 930) kepada semua warga negaranya sebagai kompensasi kebijakan darurat kesehatan tersebut.

Penyebaran virus yang tak terkendali tentu akan melemahkan perekonomian Jepang. Negara ini sendiri sebenarnya sudah di ambang resesi menyusul kenaikan pajak konsumsi tahun lalu. Beberapa gubernur pun akhirnya meminta pemerintah pusat untuk memasukkan prefektur mereka sebagai wilayah darurat di tengah kekhawatiran akan infeksi virus corona yang terus meningkat. Abe mengingatkan bahwa untuk mengakhiri situasi darurat ini, sangat penting bagi setiap orang Jepang untuk mengurangi kontak dengan orang lain, setidaknya 70 hingga 80 persen.

Banyak orang Jepang pergi ke kota asal mereka dan melakukan perjalanan selama liburan *Golden Week* yang biasanya berlangsung dari akhir April hingga awal Mei. Sebuah situasi yang mirip dengan dilema pengendalian mudik di tanah air. Warga yang bergerak bebas melintasi prefektur ini dikhawatirkan akan menyebarkan infeksi virus corona lebih luar lagi. PM. Abe meminta partai-partai yang berkuasa untuk menyetujui proposal bantuan 100.000 yen ini kepada semua warga yang terkena dampak pandemi ini. Kompensasi ini diberikan karena mereka akan diminta pemerintah untuk menahan diri dari liburan dan kegiatan luar lainnya.

Pengumuman itu datang seminggu setelah Abe mendapat kritik bertubi-tubi karena dianggap lamban merespon kondisi darurat corona. Menteri revitalisasi ekonomi Jepang, Yasutoshi Nishimura, pun mengatakan bahwa darurat kesehatan untuk seluruh negeri ini adalah masalah mendesak. Mengingat jumlah kasus kumulatif telah mencapai 100 di Hokkaido, Ibaraki, Ishikawa, Gifu, Aichi dan Kyoto.

Setelah deklarasi darurat kesehatan ini, maka masing-masing gubernur prefektur memperoleh wewenang untuk mengambil alih tanah dan bangunan pribadi untuk menambah fasilitas perawatan medis. Mereka juga dapat meminta pasokan medis dan makanan dari perusahaan dan menghukum mereka yang menimbun atau tidak mematuhi permintaan tersebut. Permintaan tinggal di rumah ini pun lantas memicu seruan untuk penyediaan kompensasi negara atas hilangnya pendapatan, atau yang selama ini dikenal sebagai Jaminan Penghasilan Dasar.

Pemerintah sebenarnya telah menyusun paket stimulus ekonomi senilai 108 triliun yen yang mencakup skema untuk memberikan 300.000 Yen kepada rumah tangga yang terdampak wabah virus. Namun, rencana tersebut nampaknya harus berubah dan berganti haluan dengan pemberian uang tunai langsung kepada semua warga negara. Oleh karena itu, Abe menginstruksikan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa untuk mempertimbangkan

penyusunan ulang anggaran tambahan untuk rencana anggaran 2020, terutama untuk membatalkan rencana paket stimulus sebelumnya yang terlalu terbatas itu.

Krisis coronavirus global telah menimbulkan seruan untuk stimulus ekonomi, tetapi Jepang berhati-hati tentang mengambil utang baru untuk membiayai langkah-langkah pengeluaran yang berani karena kesehatan fiskal negara itu adalah yang terburuk di antara negara-negara maju karena jumlah utangnya mencapai 149 persen dari PDB nya (2019). Kebijakan PM Abe yang dikenal luas sebagai “Abenomics” itu kini menghadapi ujian yang berat. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan melihat apakah terobosan pemerintah Jepang ini akan benar-benar efektif dan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian Jepang? Atau justru sebaliknya, membawa Jepang ke dalam resesi ekonomi yang semakin dalam.



## Usulan *Temporary Basic Income* (TBI) dari UNDP

Pemberian *Temporary Basic Income* (TBI) kepada orang-orang termiskin di dunia dapat memperlambat lonjakan kasus COVID-19 saat ini, demikian argumen dari UNDP yang dirilis pada tanggal 23 Juli 2020. TBI ini akan memungkinkan tiga miliar orang mampu bertahan dan tetap tinggal di rumah masing-masing. Dalam laporan tersebut, UNDP memperkirakan bahwa diperlukan biaya atau anggaran mulai dari \$ 199 miliar per bulan untuk menyediakan TBI untuk 2,7 miliar orang yang hidup di bawah atau tepat di garis kemiskinan di 132 negara berkembang.

Laporan UNDP juga menyimpulkan bahwa langkah tersebut layak dan sangat dibutuhkan, terutama di negara-negara berkembang, mengingat COVID-19 sudah menyebar pada tingkat yang lebih parah dan luas (sekitar 1,5 juta kasus baru per minggu). Alasan lainnya adalah bahwa TBI ini penting karena statistik menunjukkan bawah tujuh dari sepuluh pekerja di negara berkembang bekerja di sektor informal dan tidak dapat menghasilkan uang jika mereka hanya diam di rumah. Sehingga tidak ada pilihan lain selain jaminan sosial dalam bentuk **Basic Income** dari pemerintah untuk membantu mereka.

UNDP telah melakukan kajian dan evaluasi tentang dampak sosial ekonomi COVID-19 di lebih dari 60 negara dalam beberapa bulan terakhir dan temuan mereka menunjukkan bahwa pekerja yang tidak memiliki asuransi dan tidak terjangkau oleh program perlindungan sosial tidak dapat tinggal di rumah tanpa penghasilan sama sekali. TBI atau Penghasilan Dasar Sementara ini akan memberi mereka sarana untuk membeli makanan dan membayar biaya kesehatan dan pendidikan. Dana talangan dan rencana stimulus pemulihan ekonomi tidak boleh hanya fokus pada pasar bisnis besar saja. TBI memungkinkan pemerintah untuk menyuntikkan uang kembali ke ekonomi lokal untuk membantu menjaga usaha kecil tetap bertahan sekaligus memperlambat penyebaran COVID-19.

Menurut UNDP, salah satu cara bagi negara-negara untuk membayar TBI ini adalah dengan menggunakan kembali dana yang akan mereka gunakan tahun ini untuk membayar utang mereka. Negara berkembang diperkirakan akan menghabiskan \$ 3,1 triliun untuk pembayaran utang tahun ini. Kemacetan utang yang menyeluruh untuk semua negara berkembang, akan memungkinkan setiap negara untuk menggunakan kembali dana-dana ini sebagai langkah-langkah darurat untuk memerangi dampak dari krisis COVID-19.

Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk memperkenalkan TBI ini. Pemerintah Togo, misalnya, telah mendistribusikan lebih dari \$ 19,5 juta dalam bentuk bantuan keuangan bulanan kepada lebih dari 12 persen penduduknya melalui program bantuan tunai, sebagian besar untuk wanita yang bekerja di sektor informal. Spanyol baru-baru ini menyetujui anggaran bulanan € 250 juta untuk menambah penghasilan 850.000 keluarga rentan dan 2,3 juta individu hingga batas minimum.

COVID-19 juga telah memperburuk ketidaksetaraan global dan nasional yang ada dan telah menciptakan kesenjangan baru. Lebih dari 100 juta orang terdorong ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2020, 1,4 miliar anak-anak terdampak langsung oleh penutupan sekolah, tingkat pengangguran pun naik pesat. UNDP memperkirakan bahwa indeks pembangunan manusia global akan menurun tahun ini untuk pertama kalinya sejak konsep tersebut diperkenalkan.

## Eksperimen *Basic Income* di Jerman

Setelah Finlandia, kini Jerman menjadi negara berikutnya yang meluncurkan eksperimen jaminan penghasilan dasar tanpa syarat selama tiga (3) tahun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti-bukti empiris dan menetapkan standar baru penerapan *basic income*, khususnya di Jerman. Eksperimen ini digawangi oleh *Mein Grundeinkommen association*, *Max Planck Institute for Research on Collective Goods*, dan *University of Cologne*. Pendanaan untuk studi ini bukan berasal dari pajak atau dana pemerintah, tetapi dari sumbangan sekitar 140.000 donatur atau donor.

Fase pertama eksperimen *basic income* ini akan dimulai pada pertengahan Agustus 2020 berupa penjarangan calon penerima *basic income*. Siapa pun penduduk tetap Jerman yang berusia minimal 18 tahun dapat mendaftar untuk berpartisipasi dalam studi ini. Pelamar harus mengisi kuesioner online yang memberikan informasi kontak, jenis kelamin, jumlah orang dalam rumah tangga, jumlah anak dalam rumah tangga, dan beberapa informasi tambahan tentang situasi kehidupan pelamar secara keseluruhan, seperti pendidikan, pendapatan bersih, dan jaminan sosial yang pernah diterima.

Sekitar 1.500 orang akan direkrut untuk eksperimen ini. Dari jumlah itu, 120 orang diantaranya akan dipilih secara acak untuk menerima “gaji” sebesar 1.200 euro (Rp. 21 juta) per bulan selama tiga tahun tanpa syarat apa pun. 1.380 peserta studi yang tersisa akan berfungsi sebagai kelompok kontrol/pembanding untuk memastikan dampak *basic income* dapat diukur dengan baik.

Eksperimen yang memiliki slogan “*We want to know*” ini akan segera dimulai setelah satu juta orang Jerman mendaftarkan dirinya. Jika jumlah pelamar tidak mencapai itu, maka pada tanggal 10 November 2020, program akan tetap dimulai dengan melibatkan jumlah orang yang terdaftar hingga tanggal tersebut. Jumlah pelamar yang sangat banyak ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas data sekaligus memungkinkan diperolehnya profil penerima yang semakin beragam.

Rencananya, penghasilan dasar akan dibayarkan mulai musim semi tahun 2021. Selama studi tiga tahun tersebut, setiap peserta akan mengisi enam kuesioner online yang mencakup pertanyaan tentang beberapa aspek seperti pekerjaan, penggunaan waktu, perilaku konsumen, nilai-nilai, dan kesehatan.

## COVID-19 & *Social Democratic Capitalism*

Negara manakah yang paling berhasil dan selamat mengarungi berbagai badai sosial, ekonomi, dan politik di era modern ini? Menurut Lane Kenworthy (2020), pemenangnya adalah negara-negara yang menerapkan kapitalisme dalam sistem ekonominya, mengadopsi demokrasi dalam sistem politiknya, dan memiliki sistem jaminan sosial yang unggul untuk melindungi seluruh warga negaranya (negara kesejahteraan). Integrasi ketiga pilar utama inilah yang kemudian disebut Kenworthy sebagai sistem *Social Democratic Capitalism (SDC)*. Sistem ini dianggap telah mampu meningkatkan standar dan kualitas hidup bagi sebagian besar penduduknya, serta mendorong kesetaraan di berbagai bidang kehidupan. Perpaduan antara pertumbuhan ekonomi, kebebasan, dan jaminan perlindungan sosial (di masa sulit maupun normal) ini, menyuguhkan sebuah tata kehidupan masyarakat yang dianggap "ideal" di tengah ketidaksempurnaan sistem ekonomi dan politik global hari ini.

Kampiu SDC ini disandang oleh negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, and Swedia. Kesuksesan negara-negara ini dalam menjaga kesejahteraan ekonomi di satu sisi dan stabilitas sosial-politik di sisi lainnya, telah memunculkan *mitos* bahwa sistem SDC ini hanya dapat berhasil di negara-negara ini. Tidak mungkin untuk direplikasi di negara lain, apalagi negara-negara dengan penduduk besar seperti Amerika Serikat atau bahkan Indonesia. Namun benarkah SDC tidak dapat direplikasi? Kenworthy menyebut pemikiran seperti itu hanyalah mitos belaka. SDC sesungguhnya sangat mungkin diadopsi dan bahkan kini telah diadopsi sebagian – atau setengah hati - oleh negara-negara kapitalis maju lainnya.

Ketika masyarakat industri modern di Barat semakin maju, ternyata arah pertumbuhan dan perkembangan negara-negara Skandinavia memiliki karakteristik yang berbeda jika dibanding dengan negara-negara kapitalis maju lainnya. Termasuk, bagaimana pendekatan mereka – warga negara dan para pemimpin politiknya – dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi?

Sebagai contoh, ketika pertumbuhan ekonomi nasional meningkat, pendapatan warga negara naik, maka warga Skandinavia ini berlomba-lomba untuk membeli asuransi demi meminimalisir kehilangan (*potential loss*) di masa depan. Dengan permintaan asuransi yang demikian pesat, pemerintah di negara-negara ini pun tidak lantas menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, namun berlomba menyediakan program asuransi publik yang ramah terhadap warganya, terutama kelompok yang paling rentan dan berpendapatan rendah.

Tak hanya dalam soal pensiun, dalam hal asuransi kesehatan dan pendidikan, negara-negara Nordik ini pun terus meningkatkan anggaran publik mereka seiring dengan meningkatnya kekayaan atau pertumbuhan ekonomi negaranya. Banyak pengeluaran pemerintah yang dibelanjakan untuk mendanai asuransi publik ini. Mereka ingin memastikan bahwa setiap warga negara dapat dilindungi ketika mereka mengalami kesulitan, seperti jaminan hari tua, subsidi pengangguran, jaminan kesehatan, subsidi untuk transportasi, dukungan untuk penyandang disabilitas, dan lain sebagainya.

Semakin kaya negara itu, semakin besar porsi anggaran mereka untuk *welfare*. Semakin sejahtera negara itu, ada kecenderungan untuk semakin demokratis. Semakin demokratis, maka tentu akan semakin inklusif (terhadap perempuan, imigran, dan menjunjung tinggi kebebasan individu). Menurut Kenworthy, kesejahteraan (*wealth*) itu merupakan hasil dari beberapa **sebab** (sistem ekonomi pasar, pemerintahan yang stabil dan berpihak pada warga, serta ilmu pengetahuan) dan **konsekuensi** dari pilihan tersebut (hasrat untuk melindungi diri dari kerugian, kesetaraan/non-diskriminasi, dan kebebasan individu).

Social Democratic Capitalism (SDC), seperti diungkapkan di atas, mengandung ciri demokrasi, kapitalisme, pendidikan yang maju, perlindungan sosial yang luas, dan serapan tenaga kerja yang tinggi. Ciri-ciri yang melekat pada sistem dan kelembagaan *Social Democratic Capitalism* inilah yang sejauh ini dianggap sebagai contoh paling baik dalam sistem bernegara di era modern ini.

# Daftar Pustaka

- Bartsch, Elga et. al. 2019. Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination. SUERF Policy Note No 105
- Busch, Janine. 2020. Basic Income Pilot Project: How Does A Basic Income Change Our Society? We Want to Know". Mein Grundeinkommen e.V. (non-profit)
- ILO. 2020. How will COVID-19 affect the world of work? 19 March 2020.  
[https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS\\_739047/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739047/lang--en/index.htm)
- Jourdan, Stanislas. 2020. Helicopter Money: As a Response to the COVID-19 Recession in the Eurozone. Positive Money Europe
- Kenworthy, Lane. 2020. Social Democratic Capitalism. Oxford University Press
- Loayza, Norman V & Steven Pennings. 2020. Macroeconomic Policy in the Time of COVID-19: A Primer for Developing Countries. World Bank Group Research & Policy Brief from the World Bank Malaysia Hub
- Mudiyono. 2002. Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 6. No 1. 67-78
- Olli, Kangas. et al. 2020. Suomen perustulokokeilun arviointi. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2020:15. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus, Helsinki 2020
- Parijs, Philippe Van. 2020. Basic Income and the Left: A European Debate. Social Europe Edition.
- Standing, Guy. 2020. Battling Eight Giants: Basic Income Now. I.B. Tauris, Bloomsbury Publishing
- Standing, Guy. 2015. Basic Income: And How We Can Make It Happen. Pelican, Penguin Books
- Satanding, Guy. 2011. The Precariat: The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic
- Sahm, Claudia. 2019. Direct Stimulus Payments to Individual. Board of Governors of the Federal Reserve System.  
[https://www.hamiltonproject.org/assets/files/Sahm\\_web\\_20190506.pdf](https://www.hamiltonproject.org/assets/files/Sahm_web_20190506.pdf)
- United Nations Development Programme (UNDP). 2019. Universal Basic Income in China.  
<file:///Users/User/Downloads/Universal%20Basic%20Income%20in%20China.pdf>
- United Nations Development Programme (UNDP). 2020. Temporary Basic Income: Protecting Poor and Vulnerable People in Developing Countries. UNDP Global Policy Network.
- Walker, Robert. 2005. Social Security and Welfare: Concepts and Comparisons. Open University Press.

## Tentang Penulis

**Yanu Endar Prasetyo.** *Founder & Koordinator IndoBIG Network.* Bekerja sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2008. Saat ini sedang menyelesaikan program PhD di Jurusan Sosiologi Pedesaan, University of Missouri, Amerika Serikat. Penulis adalah *life member* dan *UBI advocates* di *Basic Income Earth Network (BIEN)* sejak 2017 dan *UBI Lab Network (UK)* sejak 2019. Ia juga tercatat aktif sebagai program leader pada *Deaton Scholars Program - The Deaton Institute (2019-2020)*, dan *MU African Interdisciplinary Studies Hub (Africa Hub)* di University of Missouri, Columbia, MO.



**Indonesian Basic Income Guarantee (IndoBIG) - Network**  
**UBI Working Paper Series**

No 1, Vol 02, Agustus 2020 | [www.indobig.net](http://www.indobig.net)